# KEUANGAN INKLUSIF UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
## (Studi Kasus di Lembaga Manajemen Infaq Kota Kediri)

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syari'ah

Oleh
Sofuan Jauhari
NIM. F14214167

**PASCASARJANA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**
**SURABAYA**

**2018**

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

| | |
|---|---|
| Nama | : Sofuan Jauhari |
| NIM | : F14214167 |
| Program | : Magister (S-2) |
| Institusi | : Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya |

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atas karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juni 2018
Saya menyatakan,

METERAI TEMPEL
B19A3ADF746704379
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Sofuan Jauhari

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang ditulis oleh **SOFUAN JAUHARI** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juni 2018

Pembimbing,

**Dr. Sirojul Arifin, S. Ag., S.S, M.E.I.**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Sofuan Jauhari ini telah diuji
pada tanggal 18 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Fatmah, ST., MM. (Ketua/ Penguji) .....
2. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag. (Penguji Utama) .....
3. Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I (Pembimbing/ Penguji) .....

Surabaya, 18 Juli 2018
Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.**
NIP. 196004121994031001

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SOFUAN JAUHARI
NIM : F14214167
Fakultas/Jurusan : Program Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah
E-mail address : sofuan.jauhari@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
**KEUANGAN INKLUSIF UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO**
**(Studi Kasus di Lembaga Manajemen Infaq Kota Kediri)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2018

Penulis,

**Sofuan Jauhari**

# ABSTRAK


Judul : Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro: Studi Kasus di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Kediri
Penulis : Sofuan Jauhari
NIM : F14214167
Pembimbing : Dr. Sirojul Arifin, S.Ag, S.S, M.E.I.
Kata Kunci : Keuangan Inklusif, Pemberdayaan Masyarakat, Sinergi Keuangan Shari'ah dan Keuangan Inklusif, Program KUBerdaya, ZISWAF.

Berdasarkan laporan G-20, problem kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang masih terjadi di Indonesia disebabkan oleh aksesibilitas rakyat terhadap lembaga keuangan eksklusif yang rendah. Pengembangan lembaga keuangan inklusif akhirnya menjadi strategi nasional untuk mengurangi problematika tersebut. Menurut Irfan Beik, upaya yang harus dilakukan salah satunya dengan menciptakan kebijakan keuangan inklusif dengan memanfaatkan potensi instrumen keuangan shari'ah berupa dana ZISWAF yang pada dasarnya berkarakter inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengamati implementasi keuangan inklusif dan hasil imolementasinya di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Kediri sebagai lembaga filantropi Islam yang mengelola dana ZISWAF.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara triangulasi (gabungan) dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan secara induktif. Adapun pendekatan studi kasus dalam penelitian ini adalah program keuangan inklusif di LMI Kota Kediri.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro di LMI Kota Kediri diwujudkan dalam program yang disebut dengan KUBerdaya. Program ini berupaya memberikan kemudahan akses keuangan kepada kelompok *non-bankable* dengan cara memberikan pinjaman modal usaha ataupun bantuan bantuan alat kerja untuk mengembangkan usaha mikro yang mereka jalankan. Tujuan program ini berhasil tercapai tapi belum secara maksimal.

Implikasi program KUBerdaya di LMI Kota Kediri telah mampu memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, meskipun belum secara signifikan. Dalam hal ini, LMI Kota Kediri perlu meningkatkan kinerja keuangan inklusif dan program yang dijalankan, dan bagi pemerintah perlu mendukung dan menicptakan kebijakan terkait keuangan inklusif berbasis shari'ah untuk pemberdayaan masyarakat.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

**Pernyataan Keaslian** ..... ii

**Persetujuan Pembimbing** ..... iii

**Pengesahan Tim Penguji** ..... iv

**Daftar Transliterasi** ..... v

**Motto** ..... vii

**Abstrak** ..... viii

**Kata Pengantar** ..... ix

**BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 7

C. Rumusan Masalah ..... 8

D. Tujuan Penelitian ..... 8

E. Kegunaan Penelitian ..... 9

F. Penelitian Terdahulu ..... 10

G. Metode Penelitian ..... 12

H. Sistematika Pembahasan ..... 19

**BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Keuangan Inklusif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Keuangan Inklusif ..... 20
2. Visi Nasional dan Tujuan Inklusif ..... 24
3. Indikator Keuangan Inklusif ..... 26
4. Sinergi Antara Keuangan Shariah dan Keuangan Inklusif
   a. Potensi ZISWAF Terhadap Keuangan Inklusif ..... 27
   b. ZISWAF Sebagai Instrumen Keuangan Inklusif ..... 30

B. Pemberdayaan Masyarakat
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat ..... 33
2. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat ..... 38
3. Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ..... 44
4. Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat ..... 49

C. Usaha Mikro
1. Pengertian Usaha Mikro ..... 53
2. Pengembangan Usaha Mikro dan Pemberdayaan Masyarakat ..... 55

**BAB III : SAJIAN DATA PENELITIAN**

A. Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Kediri
1. Profil LMI Kota Kediri ..... 58
2. Visi dan Misi LMI Kota Kediri ..... 60
3. Program Kerja LMI Kota Kediri ..... 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Implementasi Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro di LMI Kota Kediri ..... 65

C. Implikasi Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro di LMI Kota Kediri ..... 72

**BAB IV : ANALISIS DATA PENELITIAN**

A. Analisis Implementasi Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro di LMI Kota Kediri ..... 87

B. Analisis Implikasi Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro di LMI Kota Kediri ..... 99

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 104

B. Saran ..... 105

C. Penutup ..... 106

**BIBLIOGRAFI** ..... 107

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** ..... 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan persoalan yang dihadapi oleh berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang menjadi anggota G-20. Namun, antara negara maju G-20 dan Indonesia terdapat perbedaan yang signifikan. Tingkat perbedaan pendapatan perkapita Indonesia jauh lebih rendah daripada negara-negara G-20 lainnya. Indonesia mengalami distribusi pendapatan yang timpang, dan tingkat kemiskinan yang tinggi.[1]

Apabila mengacu pada laporan G-20, dengan penduduk lebih dari 237 juta orang dan jumlah UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah) yang lebih dari 57 juta unit, maka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang masih terjadi di Indonesia disebabkan oleh aksesibilitas rakyat terhadap lembaga keuangan eksklusif yang rendah.[2] Oleh karena itu, pengembangan lembaga keuangan inklusif saat ini merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan.

---

[1] Johnny W. Situmorang, "Karakteristik Koperasi Sebagai Lembaga Finansial Inklusif", *INFOKOP*, Volume 24, No. 1, dalam http://jurnal.smecda.com/index.php/infokop/article/download/119/119, (28 Juli 2017), 2.
[2] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Visi nasional keuangan inklusif dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.[3] Oleh karena itu, keuangan inklusif memungkinkan masyarakat miskin untuk menabung dan meminjam, membangun aset mereka, berinvestasi di bidang pendidikan, dan berwirausaha, serta pada gilirannya meningkatkan mata pencaharian mereka.[4]

Kemunculan strategi nasional ini tidak terlepas dari adanya kesepakatan bersama negara-negara yang tergabung dalam G-20 di Toronto, Kanada, pada tahun 2010, yang menyatakan bahwa terjadinya ketimpangan kesejahteraan antar negara dan antar manusia disebabkan oleh lemahnya akses rakyat terhadap lembaga keuangan formal konvensioanal, khususnya perbankan.[5]

*Association of South East Asian Nation* (ASEAN) juga telah mengintegrasikan program keuangan inklusif ini pada tahun 2015 melalui *Economic Blue Print.* Demikian pula dengan pimpinan dunia di PBB, mereka telah memasukkan agenda keuangan inklusif untuk menurunkan kemiskinan ke dalam delapan *Millenium Development Goals* (MDG). Pada akhir tahun 2015, upaya mengurangi kemiskinan melalui keuangan inklusif ini juga ditegaskan

[3] Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, *Booklet Keuangan Inklusif* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), 6.
[4] Johnny W. Situmorang, "Karakteristik Koperasi Sebagai Lembaga Finansial Inklusif", 11.
[5] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals* atau disingkat dengan SDGs.[6]

Keuangan inklusif memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi perbedaan pendapatan. Khasnobis dan Mavrotas mengatakan bahwa mobilisasi yang efektif dari tabungan dalam negeri untuk investasi swasta memainkan peran kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Maka, keuangan inklusif akan sangat membantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya mengakumulasi kekayaan, mengelola resiko, serta melakukan upaya untuk keluar dari kemiskinan.[7]

Irfan Beik -pengamat ekonomi syariah-, menyambut positif keuangan inklusif ini. Menurutnya, keuangan inklusif ini muncul karena dunia melihat ketidakadilan sistem keuangan sekarang. "Sistem keuangan sekarang, dari sisi funding dan financing ini timpang. Nah, dalam perjalannya, apa yang terjadi? Ketimpangan ini menjadi semakin tinggi, sehingga bahkan menimbulkan persoalan sosial politik", paparnya.[8]

Irfan Beik lalu menekankan peran penting keuangan syariah terhadap keuangan inklusif. Ia mengatakan:

> "Keuangan syariah sejak awal sudah harus inklusif. Dengan layanan jasa keuangan syariah yang ada, inklusifitas ini harus terus kita dorong dan

[6] Irfan S. Beik dan Laily D. A., *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 220.
[7] Rakhmindyarto dan Syaifullah, "Keuangan Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan", dalam http//: kemenkeu.go.id, (25 Oktober 2016), 2.
[8] Yudi Suharsono, "Peran Keuangan Syariah dalam Keuangan Inklusif", dalam http://mysharing.co/keuangan-syariah-bisa-berperan-besar-dalam-keuangan-inklusif, (1 Maret 2018), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kembangkan. Upayanya yaitu melalui levelnya masing-masing. Untuk kaum lemah (*ḍuafa*), bisa lewat zakat, sehingga nantinya bisa naik kelas menjadi kelompok zakat-*able* (mampu berzakat). Kemudian nanti yang sudah zakat-*able* naik ke BMT-*able* atau mikro banking-*able*. Dan lalu berlanjut terus hingga sampai menjadi *bankable*. Jadi tahapan-tahapan ini yang sebenarnya harus kita dorong di tanah air."[9]

Jadi, menurut Irfan Beik, ketika layanan jasa keuangan inklusif melalui keuangan syariah ini sudah berjalan menurut alur di atas, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana harmonisasi kebijakan keuangan inklusif ini dengan memanfaatkan semua instrumen keuangan syariah yang ada di atas. Namun, sayangnya masih banyak unsur-unsur pemerintah yang masih menganggap remeh atau kecil potensi instrumen dan lembaga keuangan syariah, padahal justru seharusnya pemerintah mendorong agar keuangan syariah dan keuangan inklusif bisa bersinergi, mulai dari akar rumput sampai yang paling atas. Keuangan syariah bisa berperan besar dalam keuangan inklusif. "Ini yang seharunya menjadi skenario nasional", kata Irfan Beik.[10]

Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI tahun 2014 saat membuka seminar Nasional Keuangan Inklusif juga menegaskan pentingnya menciptakan sinergi antara keuangan syariah dan keuangan inklusif. Ia menjelaskan:

> "Keuangan syariah dan kebijakan keuangan inklusif memiliki potensi untuk bersinergi dengan baik, mengingat kesamaan konsep, yaitu keuangan inklusif bertujuan memberikan akses keuangan yang mudah, murah, aman dan sesuai bagi masyarakat *unbanked*, serta bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat agar mampu hidup lebih sejahtera dan keluar dari garis kemiskinan. Sementara prinsip syariah bertujuan

[9] Yudi Suharsono, "Peran Keuangan Syariah dalam Keuangan Inklusif", 1.
[10] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mensejahterakan masyarakat melalaui prinsip parthnership dan *profit sharing*."[11]

Menurut Halim, konsep *partnership* antara keuangan shariah dan keuangan inklusif saat ini sangat dibutuhkan kelompok *unbanked* mengingat rendahnya tingkat literasi keuangan dan akan mempercepat membantu mereka ke arah yang lebih baik. Disamping itu, perlunya sinergi keuangan syariah dan keuangan inklusif ini karena pemikiran tentang keuangan inklusif syariah saat ini telah berkembang, khususnya terkait dengan pemanfaatan potensi dari kegiatan yang bernilai sosial.

Sektor kegiatan yang bernilai sosial yang dimaksud adalah sistem zakat dan wakaf sebagai bagian dari instrumen keuangan syariah dengan potensi sekitar Rp 217 triliun (atau setara dengan 3,4 persen PDB Indonesia) yang dapat memainkan peran penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendukung stabiltas keuangan. Zakat dan instrumen keuangan syariah yang lain juga berperan dalam penciptaan *saving* dan investasi masyarakat yang dapat mendorong terciptanya intermediasi dan akses keuangan yang lebih luas, sehingga dapat tercipta sistem sistem keuangan yang lebih stabil.[12]

Peran penting Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF) sebagai instrumen keuangan syariah terhadap keuangan inklusif juga disampaikan oleh Kabir Hasan dalam kuliah umum *Islamic Financial Services* di Jakarta. Kabir

[11] Yudi Suharso, "Keuangan Syariah dan Keuangan Inklusif Bisa Bersinergi", dalam http//:mysharing.co/keuangan-syariah-dan-keuangan-inklusif-bisa-bersinergi, (1 Juni 2018), 1.
[12] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasan menjelaskan bahwa bank syariah memiliki keterbatasan pada regulasi, sehingga harus ada alternatif kerjasama dengan non bank. Kerjasama ini dapat dimunculkan melalui integrasi ZISWAF dengan lembaga keuangan mikro yang dapat berperan sebagai jaring pengaman, rehabilitasi, menurunkan biaya operasional sehingga lebih terjangkau, hingga memberdayakan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan penyediaan pengembangan bisnis.[13]

Berdasarkan paparan diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tentang keuangan inklusif di salah satu lembaga keuangan mikro syariah, yaitu LMI (Lembaga Manajemen Infāq) Kota Kediri. LMI merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Jawa Timur yang berkantor pusat di Surabaya yang berdiri sejak 1955.

Seluruh dana donatur untuk mustaḥiq dihimpun LMI melalui ZISWAF (Zakāt, Infāq, Ṣadāqah dan Waqaf) yang diperiksa oleh akuntan publik dalam pengelolaannya. LMI dalam mengelola dana ZISWAF memiliki beberapa program untuk pemberdayaan masyarakat, meliputi; program Pintar, program Sehati, program Emas, program Dakwah, program Yatim dan program Kemanusiaan.

Berdasarkan pengamatan dari beberapa program yang ada, LMI memiliki satu program keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat di bidang

[13] Yudi Suharso, "Perlunya Integrasi Instrumen Sosial dengan Keuangan Mikro", *Kuliah Umum Islamic Financial Services*, dalam http://mysharing.co/perlunya-integrasi-instrument-sosial-dengan-keuangan -mikro/, (2 April 2018), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi. Program ini merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat *ḍuāfa* (miskin dan berpenghasilan rendah) dengan memanfaatkan potensi ZISWAF yang dikelola oleh LMI. Program ini meliputi: program santunan fakir miskin, qurban, dan lain sebagainya.

Program keuangan inklusif di LMI juga memiliki tujuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara produktif yang dilakukan melalui pengembangan usaha mikro. Melalui program ini, LMI mengharapkan terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan skala ekonomi masyarakat melalui peningkatan usahanya sehingga memiliki kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan kemandirian bagi mereka dalam mengelola keuangan serta dapat merubah status *mustaḥiq* (konsumen zakat) menjadi *muzakki* (kontributor zakat). Dalam implementasinya, prosentasi keberhasilan program ini berada pada angka 40% dan belum mencapai hasil yang maksimal.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis paparkan beberapa masalah yang berkenaan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Peran lembaga keuangan inklusif untuk mengentaskan kemiskinan, menghapus ketimpangan dan menciptakan sistem keuangan yang stabil.
2. Pemberdayaan masyarakat melalui keuangan inklusif untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam bidang keuangan dan ekonomi yang berkelanjutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sinergi antara keuangan syariah dan keuangan inklusif
4. Peran dan manfaat potensi ZISWAF dalam mendukung strategi nasional keuangan inklusif.
5. Keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro di Lembaga Manajemen Infaq Kota Kediri

Dari beberapa permasalahan di atas, maka sebagai upaya untuk mencapai hasil penelitian yang lebih baik, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini, yaitu tentang "keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro di LMI Kota Kediri".

## C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini bertujuan untuk mempermudah melakukan analisis. Rumusan masalah dalam penelitian ini bersumber dari ruang lingkup penelitian yang telah dibatasi, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro di LMI Kota Kediri?
2. Bagaimana implikasi keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro di LMI Kota Kediri?

## D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro di LMI Kota Kediri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro di LMI Kota Kediri.

## E. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoretis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu-ilmu keIslaman, khususnya dalam bidang ekonomi shariah.
   b. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan sistem keuangan inklusif berbasis shariah sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.
2. Aspek Praktis
   a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi LMI Kota Kediri, pada khususnya, dan lembaga-lembaga sejenis, pada umumnya, dalam pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sistem keuangan inklusif berbasis shariah.
   b. Bagi kalangan pemegang *policy*, praktisi, dan masyarakat ekonomi pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dasar untuk memahami sistem keuangan inklusif berbasis shariah dan selanjutnya mengambil sikap dan kebijakan yang proporsional terkait keberlangsungannya sebagai sebuah sistem keuangan yang berdaya guna dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bagi kalangan akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya terkait sistem keuangan inklusif berbasis shariah.

## F. Penelitian Terdahulu

Sebenarnya penelitian yang semisal dengan ini sudah pernah ada, namun ada beberapa perbedaan fokus antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti ini. Adapun di antara penelitian yang sudah pernah ada adalah sebagai berikut:

1. Setyani Irmawati, Delu Damelia, dan Dita Wahyu Puspita, "Model Keuangan Inklusif pada UMKM Berbasis Pedesaan", dalam penelitian ini lebih fokus pada model keuangan inklusif pada UMKM berbasis pedesaan dengan menekankan pada aspek permodalan dan pemasaran. Sementara di dalam penelitian penulis lebih fokus terhadap keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, sehingga penelitian penulis dengan penelitian ini berbeda.[14]
2. Zakia Finnafsi Sukandar, "Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Dana Qardhul Hasan: Studi Kasus pada Program EMAS di LMI Kota Kediri". Penelitian ini lebih fokus pada model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan LMI Kota Kediri dalam mengentaskan kemiskinann dengan memberi pinjaman, baik berupa materi maupun alat

[14] Setyani Irmawati, Delu Damelia, dan Dita Wahyu Puspita, "Model Keuangan Inklusif pada UMKM Berbasis Pedesaan", *JEJAK, Journal of Economics and Policy,* dalam http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak dikases 25 April 2017, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha kepada mustaḥiq dengan akad pembiayaan qarḍ al-ḥasan. Sementara di dalam penelitian yang dibahas di sini lebih fokus terhadap keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, sehingga penelitian Zakia dengan penelitian ini berbeda.[15]

3. Nurzanah Esa Hendrani, "Peran Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Kediri Cabang Kota Kediri dalam Memberdayakan Kaum Marginal di Kelurahan Semampir". Penelitian ini membahas tentang sistem pendistribusian dana zakatnya untuk pemberdayaan kaum marginal di kelurahan Semampir dengan cara memberikan modal Rp. 500.000,- untuk pelatihan *life skill* melalui pelatihan pembuatan kue dan flanel untuk para ibu-ibu binaan di Semampir. Oleh karena itu, penelitian Nurzanah dengan penelitian ini berbeda.[16]
4. Diyah Ulfiana, "Peranan Pembiayaan *Qarḍ al-Ḥasan* dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Bidang Usaha Kecil dan Menengah: Studi Kasus di BMT Ar-Rahman Tulungagung". Penelitian disini lebih menekankan efektivitas sistem pembiayaan qarḍ al-ḥasan yang dilakukan oleh bagian pengelolaan pembiayaan di BMT Ar-Rahman Tulungagung dalam mengatasi

[15] Zakia Finnafsi, "Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Dana Qard al-Hasan: Studi Kasus pada LMI Kota Kediri" (Skripsi - STAIN, Kediri, 2014).
[16] Nurzanah Esa Hendrani, "Peran Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Kediri Cabang Kota Kediri dalam Memberdayakan Kaum Marginal di Kelurahan Semampir" (Skripsi -STAIN, Kediri, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hambatan dan kesulitan nasabah, sehingga penelitian Diyah dengan penelitian ini berbeda.[17]

Dari penjelasan perbedaan beberapa penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan diteliti ini, bisa kita lihat jelas letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.[18]

Pendekatan studi kasus dilakukan di LMI Kota Kediri. Secara umum, studi kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris *"Case Studies"*. Kata "Kasus" diambil dari kata *"Case"* yang menurut Kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (1998, 173), diartikan

[17] Diyah Ulfiana (2008), "Peranan Pembiayaan *Qardh al-Hasan* dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Bidang Usaha Kecil dan Menengah: Studi Kasus di BMT Ar-Rahman Tulungagung" (Skripsi - STAIN, Kediri, 2008).

[18] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad S., *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai 1). "*instance or example of the occurance of sth.* ( contoh kejadian sesuatu) 2). "*actual state of affairs; situation"* (kondisi aktual dari keadaan sesuatu), 3). "*circumstances or special conditions relating to a person or thing*" (lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu).[19] Dari penjabaran definisi tersebut, Mudjia Raharjo membuat kesimpulan bahwa studi kasus ialah:

> "Suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut".[20]

Peristiwa inilah yang kemudian disebut sebagai kasus, yang bisa berupa kasus yang sangat sederhana atau bisa pula kompleks. Tapi biasanya kasus yang dipilih adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan yang sudah lewat.[21]

2. **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah merupakan benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian tetap, dan yang dipermasalahkan.[22] Subjek penelitian dalam karya tulis ini adalah penanggung jawab program keuangan inklusif di LMI Kota Kediri dan penerima manfaat program tersebut.

---

[19] Mudjia Raharjo, "Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya", dalam http://repository.uin-malang.ac.id/artikel, (14 Maret 2018), 2-3.
[20] Ibid., 3.
[21] Mudjia Raharjo, "Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya", 3.
[22] Arikunto Suharismi, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Objek penelitian adalah yang menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang diteliti, juga di mana dan kapan penelitian dilakukan.[23] Untuk itu, objek penelitian dalam penelitian ini keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro di LMI Kota Kediri. Penelitian ini dilakukan mulai Desember 2016 sampai dengan Juni 2018.

3. **Sumber Data dan Responden**

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.[24] Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit dan relevan meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung. Sumber primer yang dimaksud adalah penanggung jawab program keuangan inklusif di LMI Kota Kediri dan para penerima manfaat program tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan guna mendukung sumber data primer untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan dari data primer. Sumber

[23] Husain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafondo Persada, 2005), 303.
[24] Arikunto Suharismi, *Manajemen Penelitian*, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data sekunder dalam penelitian ini mencakup data-data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan dan kajian akademik.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang diapakai dalam penelitian kualtiatif, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang berarti pengamatan atau peninjauan merupakan salah satu cara yang dapat dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitia kualitatif.[25] Observasi lebih spesifik dibandingkan dengan wawancara dan kuesioner, observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.[26]

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.[27] Peneliti akan melakukan wawancara dengan penanggung jawab program keuanagn inklusif di LMI Kota Kediri dan para penerima manfaat program tersebut.

c. Dokumentasi

[25] J.S. Badudu dan Sutan M. Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 95.
[26] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 203.
[27] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumentasi dalam pengumpulan data adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.[28] Pada penelitian kualitatif, data bersifat deskriptif, seperti foto, dokumen, artefak atau catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.

5. **Teknik Pengolahan Data**

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[29]
b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[30]
c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[31]

---

[28] Arikunto S., *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2008), 203.
[29] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[30] Ibid., 154.
[31] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Teknik Analisa Data**

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data di penelitian ini adalah adalah analisis induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.[32] Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah pelaksanaan keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro di LMI Kota Kediri. Setelah melakukan pengumpulan data, penulis mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum melalui penentuan rumusan masalah, lalu menemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah tersebut.

7. **Teknik Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan Triangulasi, yaitu pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi juga bisa didefinisikan dengan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar bukti dan data yang sudah ada untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data yang yang sudah ada.[33]

Triangulasi ini meliputi empat hal, antara lain :

1) Triangulasi metode, yaitu membandingkan data dengan cara yang berbeda, seperti menggunakan subjek penelitian yang berbeda.

[32] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.
[33] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2005), 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Triangulasi ini dilakukan jika data yang diperoleh dari subjek penelitian diragukan kebenarannya.

2) Triangulasi antar-peneliti, yaitu teknik dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya informasi yang digali dari subjek penelitian.
3) Triangulasi sumber data, yaitu teknik dengan menggali kebenaran informasi tertentu dari sumber perolehan data yang belum digunakan, seperti dokumen tertulis, arsip, atau dokumen sejarah. Triangulasi seperti ini akan menghasilkan data yang berbeda.
4) Triangulasi teori, yaitu teknik dengan membandingkan hasil akhir penelitian atau *thesis statement* untuk menghindari bias individual peneliti atas kesimpulan yang dihasilkan. Triangulasi teori ini dapat dilakukan dengan menggunakan:
   a. Bahan referensi, yaitu bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, seperti rekaman wawancara, foto-foto dan dokumen autentik.
   b. *Member check*, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian data yang diperoleh secara keseluruhan.[34]

[34] Mudjia Raharjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif", dalam http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html, (13 Juni 2017), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang landasan teori yang diambil dari beberapa literatur dan penelitian terdahulu tentang keuangan inklusif, pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro.

BAB III : SAJIAN DATA PENELITIAN

Berisi penjelasan tentang data yang diteliti meliputi profil LMI Kota Kediri, implementasi dan implikasi keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro di LMI Kota Kediri.

BAB IV : ANALISIS DATA PENELITIAN

Berisi tentang analisis data hasil penelitian tentang implementasi dan implikasi keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro di LMI Kota Kediri dengan menggunankan landasan teori dan hasil penelitian yang sudah ada.

BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan kata-kata penutup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. KEUANGAN INKLUSIF

### 1. Pengertian Keuangan Inklusif

Istilah keuangan inklusif atau dalam bahasa Inggris *financial inclusion* bersinonim dengan frasa *inclusive financial system*, yang berarti sistem jasa layanan keuangan yang bersifat universal, non eksklusif. Inklusivitas keuangan ini sebenarnya lebih merujuk pada visi untuk menciptakan satu sistem jasa keuangan yang mampu menjagkau semua kalangan, tidak hanya kalangan berada, tetapi juga kalangan berpenghasilan rendah atau miskin.[1]

Keuangan inklusif terdiri dari dua kata utama, yaitu keuangan dan inklusif. Keuangan, secara etimologi diartikan sebagai segala sesuatu yang bertalian dengan uang,[2] sedangkan inklusif berarti termasuk atau terhitung.[3] Tetapi, jika kedua kata ini digabung, secara terminologi akan memunculkan makna baru terkait sebuah agenda global, yaitu agenda keuangan yang dibuat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola risiko, mengelola uang agar dapat dikonsumsi di kemudian hari, hingga pada akhirnya mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya.[4]

---

[1] Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan* (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), 54.
[2] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1576.
[3] Ibid., 556.
[4] Irfan S. Beik dan Laily D. A., *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah keuangan inklusif menurut Bank Indonesia (BI) mulai diperkenalkan kepada masyarakat dunia pasca krisis tahun 2008 dan terus berkembang sampai saat ini. Keuangan inklusif didasari oleh kehidupan masyarakat kelompok bawah *(in the bottom of the pyramid)* yang jumlahnya besar yang paling terpukul dari krisis tersebut. Keberadaan keuangan inklusif bermaksud membela mereka dengan memberdayakannya dalam aktifitas kehidupan ekonomi melalui pembinaan secara berkelanjutan agar mandiri dalam menjalani kehidupan, bukan hanya dengan bantuan dana/pangan yang dilakukan secara konsumtif.[5]

Terdapat beberapa definisi yang menjelaskan batasan serta karakteristik utama keuangan inklusif. *Global Financial Development Report* (GFDR) mendefinsikan keuangan inklusif sebagai "*The proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other* stakeholders, yaitu suatu keadaan di mana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi.[6]

---

[5] Bachtiar Hassan Miraza, "Membangun Keuangan Inklusif", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 23, No. 2, (Desember 2016), 1.

[6] Meilisa Salim et al., "Analisis Implementasi Program Keuangan Inklusif di Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan: Studi pada Pedagang Golongan Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia", dalam http://thesis-binus.ac.id/doc/WorkingPaper/2013-2-01123.pdf, (20 April 2018), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan keuangan inklusif sebagai segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan.[7]

Senada dengan OJK, *Rangarajan Committe* mendefinisikan keuangan inklusif sebagai proses untuk memastikan kaum miskin dan/atau kalangan berpenghasilan rendah mendapatkan layanan keuangan. Umumnya berupa kredit dengan jangka waktu dan besaran biaya pengembalian yang masuk akal (*reasonable*).[8]

*House of Commons Treasury Committe* menawarkan definisi yang lebih operasional, bahwa keuangan inklusif merupakan kemampuan individu dalam mengakses berbagai produk jasa keuangan yang terjangkau serta sesuai dengan kebutuhannya. Secara khusus, kemampuan ini berkaitan dengan satu rangkaian pemahaman yang meliputi keuangan *financial awareness* (kesadaran finansial), pengetahuan tentang bank dan jaringan perbankan

---

[7] Triana Fitriastuti, et al., "Implementasi Keuangan Inklusif bagi Masyarakat Perbatasan: Studi Kasus pada Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia", *Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi SNEMA*, dalam http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/0_pdf., (15 April 2018), 40.

[8] Meta Ardiana, "Kontrol Diri, Pendidikan Pengelolaan Keuangan Keluarga, Pengetahuan Inklusi Keuangan Siswa Pengaruhnya terhadap Perilaku Menabung Siswa SMK Se Kota Kediri", *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, Volume 4 No. 1, dalam http://www.researchgate.net/publication/315655680/fultext.pdf, (21 April 2018), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus pengetahuan mengenai berbagai fasilitas yang disediakan dunia perbankan, serta pemahaman tentang keuntungan memanfaatkan jalur perbankan sebagai pemberi layanan jasa keuangan. Dalam hal ini, kualitas layanan jasa keuangan inklusif ditentukan oleh harga layanan yang terjangkau, tata cara penyelenggaraan yang layak dengan tetap menjaga martabat klien (penerima manfaat).[9]

Jadi, pada dasarnya skema keuangan inklusif ini menawarkan berbagai layanan keuangan yang bertujuan menjangkau semua segmen masyarakat, dengan biaya yang terjangkau serta waktu pengembalian kredit yang masuk akal. Adapun aspirasi utama dari jalan pikiran keuangan inklusif ialah mereduksi ketidakadilan ekonomi dengan cara menyediakan kesempatan yang sama ke dalam lembaga permodalan.[10]

Secara sederhana, konsep keuangan inklusif berarti "keuangan untuk bersama". Sebuah makna bahwa sistem keuangan mulai dari birokrasi keuangan dan ketermanfaatan keuangan tidak hanya menjadi milik segelintir orang-orang, tetapi juga dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat termasuk orang miskin sekalipun. Tentu saja hal ini mengindikasikan bahwa penerapan keuangan inklusif bukan sekadar kemudahan akses perbankan, tapi juga mencakup ketermanfaatan lembaga keuangan bagi setiap masyarakat.

[9] Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*, 55-56.
[10] Ibid., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, konsep pemberdayaan masyarakat lebih menjadi tujuan utama dibanding kemudahan akses keuangan saja.[11]

**2. Visi Nasional dan Tujuan Keuangan Inklusif**

Visi nasional keuangan inklusif dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.[12] Visi nasional mewujudkan keuangan inklusif di Indonesia tidak kalah penting dengan pembangunan di sektor infrastruktur, pertanian, energi, industri kreatif, pertahanan, dan sektor-sektor strategis lainnya.

Keuangan inklusif bahkan menjadi jangkar tolak ukur keberhasilan pembangunan di semua sektor, karena tanpa keuangan inklusif, pembangunan hanya akan menjadikan rakyat sebagai objek. Kalaupun ikut menikmati, rakyat hanya mendapat sisa-sisa pembangunan.[13] Visi keuangan inklusif tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan, sebagai berikut:

a. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin dan

[11] Hesi Eka Puteri, "Kontribusi BPRS Merealisasi Financial Inclusion dalam Penguatan Ekonomi Lokal: Evaluasi Penguatan Strategi", *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies,* Vol.1, No.1, dalam https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/islam_realitas/article/download/3/52, (30 Juli 2017), 22.
[12] Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, *Booklet Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), 6.
[13] Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marjinal merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus lebih besar kepada penduduk miskin.

b. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.
d. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan.
e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.

f. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan. Teknologi dapat mengurangi biaya transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui sekedar layanan tabungan dan kredit. Namun pedoman dan peraturan yang jelas perlu ditetapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan resikonya.[14]

Dilihat dari segi intensinya, skema jasa keuangan inklusif bertujuan untuk mengatasi situasi kemiskinan. Pertama, keuangan inklusif ini ditujukan sebagai satu usaha untuk membuka ekskluivitas lembaga keuangan yang pada umumnya hanya memberi permodalan kepada pihak-pihak yang yang dianggap *bankable*. Kedua, didalam keuangan inklusif ini terdapat satu niat, yaitu kesediaan untuk kembali memasukkan pihak non-bankable, yaitu yang selama ini dieksklusi atau dipinggirkan dari lembaga keuangan dikategorikan kembali sebagai pihak yang layak mendapatkan berbagai jasa layanan keuangan.[15]

**3. Indikator Keuangan Inklusif.**

Untuk mengetahui sejauh mana perekembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. Dari beberapa referensi, indikator

[14] Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, *Booklet Keuangan Inklusif*, 6-7.
[15] Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*, 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat dijadikan ukuran sebuah Negara dalam mengembangkan keuangan inklusif adalah:[16]

1) Ketersediaan akses: mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
2) Penggunaan: mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, meliputi: keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan.
3) Kualitas: mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.

**4. Sinergi Antara Keuangan Shariah dan Keuangan Inklusif**

**a. Potensi ZISWAF terhadap Keuangan Inklusif**

Irfan Beik -pengamat ekonomi syariah-, menyambut positif munculnya keuangan inklusif ini. Dalam terminologi shariah, Irfan Beik menyebutnya dengan keuangan inklusif shariah, yang didefinisikan sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan shariah sehingga masyarakat mampu mengelola dan mendistribusikan sumber keuangan sesuai prinsip shariah. Keuangan inklusif shariah merupakan upaya untuk mendorong keterlibatan yang lebih tinggi dari masyarakat terhadap praktik keuangan shariah.[17]

Menurutnya, keuangan inklusif ini muncul karena dunia melihat ketidakadilan sistem keuangan sekarang. Irfan mengatakan bahwa telah

[16] Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, *Booklet Keuangan Iklusif*, 14.
[17] Irfan S. Beik dan Laily D. A., *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi ketimpangan dari sisi funding dan financing pada sistem keuangan saat ini. Dalam perjalananya, ketimpangan ini menjadi semakin tinggi, bahkan menimbulkan persoalan sosial politik.[18]

Oleh karena itu, Irfan Beik menekankan peran penting keuangan syariah terhadap keuangan inklusif dengan memaksimalkan potensi instrumen keuangan shariah yang meliputi Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF). Ia mengatakan:

> "Keuangan syariah sejak awal sudah harus inklusif. Dengan layanan jasa keuangan syariah yang ada, inklusifitas ini harus terus kita dorong dan kembangkan. Upayanya yaitu melalui levelnya masing-masing. Untuk kaum lemah (ḍuafa), bisa lewat zakat, sehingga nantinya bisa naik kelas menjadi kelompok zakat-able (mampu berzakat). Kemudian nanti yang sudah zakat-able naik ke BMT-able atau mikro banking-able. Dan lalu berlanjut terus hingga sampai menjadi bankable. Jadi tahapan-tahapan ini yang sebenarnya harus kita dorong di tanah air".[19]

Jadi, menurut Irfan Beik, ketika layanan jasa keuangan inklusif melalui keuangan syariah ini sudah berjalan menurut alur di atas, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana harmonisasi kebijakan keuangan inklusif ini dengan memanfaatkan semua instrumen keuangan syariah yang ada di atas. Problemnya, masih banyak unsur-unsur pemerintah yang masih menganggap remeh atau kecil potensi instrumen keuangan syariah, padahal justru seharusnya pemerintah mendorong agar keuangan syariah dan keuangan inklusif bisa bersinergi, mulai dari akar rumput sampai yang

[18] Yudi Suharsono, "Peran Keuangan Syariah dalam Keuangan Inklusif", 2.
[19] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling atas. Keuangan syariah bisa berperan besar dalam keuangan inklusif. "Ini yang seharunya menjadi skenario nasional", kata Irfan Beik.[20]

Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI tahun 2014 saat membuka seminar Nasional Keuangan Inklusif juga melihat potensi instrumen keuangan shariah bagi strategi nasional keuangan inklusif. Dia mencontohkan zakat dan wakaf sebagai bagian dari instrumen keuangan syariah yang memiliki potensi sekitar Rp 217 triliun (atau setara dengan 3,4 persen PDB Indonesia). Kedua instrumen ini dapat memainkan peran penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendukung stabiltas keuangan. Zakat dan instrumen keuangan syariah yang lain juga berperan dalam penciptaan *saving* dan investasi masyarakat yang dapat mendorong terciptanya intermediasi dan akses keuangan yang lebih luas, sehingga dapat tercipta sistem sistem keuangan yang lebih stabil.[21]

Potensi Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF) sebagai instrumen keuangan syariah terhadap keuangan inklusif juga disampaikan oleh Kabir Hasan dalam kuliah umum *Islamic Financial Services* di Jakarta. Kabir Hasan menjelaskan bahwa Bank syariah memiliki keterbatasan pada regulasi, sehingga harus ada alternatif kerjasama dengan non bank. Kerjasama ini dapat dimunculkan melalui integrasi

[20] Yudi Suharsono, "Peran Keuangan Syariah dalam Keuangan Inklusif", 3.
[21] Halim Alamsyah, "Keuangan Syariah dan Keuangan Inklusif Bisa Bersinergi", .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ZISWAF dengan lembaga keuangan mikro yang dapat berperan sebagai jaring pengaman, rehabilitasi, menurunkan biaya operasional sehingga lebih terjangkau, hingga memberdayakan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan penyediaan pengembangan bisnis.[22]

Jhordy Kashoogie mendukung potensi besar dan peran penting keuangan sharīah ini, khususnya melalui pengembangan zakat dan wakaf. Menurutnya, pengembangan zakat dan wakaf dapat mendukung BI (Bank Indonesia) dalam pengendalian pertumbuhan ekonomi melalui inisiatif keuangan inklusif dalam penguatan basis produksi dan perluasan akses masyarakat terhadap jasa keuangan shariah. Distribusi zakat dan wakaf yang efisien akan memberikan dana awal bagi pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Pada akhirnya hal ini akan meningkatkan skala ekonomi dan mempermudah mereka menjangkau akses layanan keuangan dari lembaga keuangan shariah yang komersil.[23]

**b. ZISWAF sebagai Instrumen Keuangan Inklusif**

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang penting bagi masyarakat muslim, dan memiliki peran pokok dalam mewujudkan keadilan redistribusi pendapatan antara umat Islam. Oleh karena itu, zakat dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber dana pemberdayaan masyarakat.

[22] Yudi Suharso, "Perlunya Integrasi Instrumen Sosial dengan Keuangan Mikro", 1.
[23] Jhordy Kashoogie, "Kelola Zakat Untuk Umat", 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Dunya, zakat memiliki peranan investasi karena mengarah langsung kepada pengadaan sumber daya produksi manusia dalam masyarakat.[24] Al-'Audhi menambahkan bahwa zakat adalah sarana utama untuk mengumpulkan akumulasi modal masyarakat.[25]

Dalam aspek pendistribusian dana, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola konsumtif dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Pola penyaluran produktif bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori mustahiq (penerima manfaat) menjadi muzakki (pemberi manfaat).[26]

Oleh karena itu, melalui penyaluran produktif ini, Affar berpendapat bahwa zakat mempunyai peranan untuk memberikan kepemilikan bagi fakir miskin berupa sarana produksi seperti memberikan mereka rumah untuk tempat tinggal, alat yang dipakai untuk bekerja atau modal usaha. Selama kita boleh memperoleh zakat berupa barang modal, maka boleh pula bagi kita untuk mendistribusikan zakat tersebut dalam bentuk barang modal dan ini akan menjadi alat produksi bagi fakir miskin.[27]

Jadi, zakat dapat berperan sebagai instrumen keuangan inklusif dalam rangka mendukung strategi nasional keuangan inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan,

---

[24] Dunyā, *Tamwīl at-Tanmiyyah fī al-Iqtiṣōd al-Islāmī* (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1984), 281
[25] Rif'at as-Sayyid 'Auḍi, *Minhāj al-Iddikhār wa al-Istimār fī al-Iqtiṣād al-Islāmī* (Kairo: Al-Ittihād ad-Dawlī al-Bunūk al-Islamiyah, tt), 85
[26] Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. 4 (Yogyakarta: LkiS, 2004), 122.
[27] Muhammad 'Abdul Mun'im 'Affār, *at-Takhtīṭ wa at-Tanmiyyah fī al-Islām* (Jeddah: Dār al-Bayān al-'Arabī, 1985), 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini Noor menguatkan bahwa secara riil, dana zakat dapat dialokasikan untuk mengatasi dampak dari pembangunan ekonomi Indonesia, yakni berupa hutang, pengangguran, dan kemiskinan. Hal ini disebabkan potensi zakat yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan peluang bagi terwujudnya kesejahteraan[28]

Menurut Noor, infaq, sadaqah dan wakaf juga dapat menjadi instrumen keuangan inklusif jika dialokasikan dalam wujud penyaluran produktif, misalnya infaq dan sadaqah materiil yang dialokasikan untuk pinjaman modal usaha bagi pengembangan usaha mikro.[29] Adapun terkait wakaf, produk fiqh kontemporer mewadahi bagi kaum Muslim yang ingin berwakaf tunai. Wakaf tunai ini membuka peluang kebermanfaatan bagi masyarakat yang lebih luas. Misalnya, ketika wakaf tunai terkumpul, maka bisa dibangunkan tempat pelatihan dan pendidikan kerja bagi masyarakat yang belum cukup ketrampilannya, sehingga dapat menciptakan produktifitas kerja dan usaha atau untuk membangun lembaga keuangan mikro shariah yang mampu menjadi partner bagi *du'afa* dalam hal pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.[30]

---

[28] Ruslan A. G. Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam: Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 30.
[29] Arin Setyowati, "Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF oleh Civil Society dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Lazismu Surabaya", *Jurnal Maṣārif as-Sharī'ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Sharī'ah,* Vol. 2, No.1, dalam http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/download/1361/1100/, (21 Mei 2018), 10.
[30] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### 1. Pengertian Pemberdayan Masyarakat

Istilah pemberdayaan berasal dari kata daya, dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti kemampuan melakukan sesuatu atau bertindak. Pemberdayaan berarti merupakan cara, proses, upaya untuk menjadikan pihak lain memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu.[31]

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan merupakan terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata empower mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to atau enable* atau usaha untuk memberi kemampuan dan atau keperdayaan[32] Jadi, kata daya mengandung dua makna pokok, yaitu mampu dan mempunyai kuasa.[33]

Menurut Mardi Y. Hutomo, konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari empat kerangka logik, antara lain: 1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari

---

[31] Kemdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 241-242.
[32] Mardi Y. Hutomo, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoretik dan Implementasinya", dalam http://www.bappenas.go id/files/2913/5022/6062/, (2 Juni 2018), 1-2.
[33] Sirajul Arifin, "Ekonomi Lumbung dan Konstruksi Keberdayaan Petani Muslim Madiun", *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan,* Vol. 10, No. 1, dalam http://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/ inferensi/article/download/482/387, (11 Appril 2018), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemusatan penguasaan faktor produksi; 2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; 3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi, dan 4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan tunadaya.

Akhirnya, dari empat kerangka logik ini memunculkan dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai ini, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).[34]

Adapun secara praktis, Mardi Y. Hutomo melihat setidaknya ada 3 konsep pemberdayaan.[35] Konsep pertama, pemberdayaan yang hanya berkutat di 'daun' dan 'ranting' atau pemberdayaan konformis. Berawal dari struktur sosial dan struktur ekonomi yang sudah dianggap *given*, maka pemberdayaan adalah usaha bagaimana masyarakat tunadaya harus menyesuaikan dengan yang sudah *given* tersebut. Bentuk riil dari konsep ini adalah merubah sikap mental masyarakat tunadaya dan pemberian santunan,

[34] Mardi Y. Hutomo, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi", 1-2.
[35] Ibid., 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti pemberian bantuan modal dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut *magical paradigm.*

Konsep kedua, pemberdayaan yang hanya berkutat di 'batang' atau pemberdayaan reformis. Artinya, secara umum tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya tidak ada masalah. Masalah terdapat pada kebijakan operasional. Oleh sebab itu, pemberdayaan gaya ini adalah adalah mengubah dari *top down* menjadi *bottom up*, sambil mengembangkan sumber daya manusianya, menguatkan kelembagaanya, dan sejenisnya. Konsep ii sering disebut *naive paradigm.*

Konsep ketiga, pemberdayaan yang hanya berkutat di 'akar' atau pemberdayaan struktural. Pemberdayaan ini disebabkan oleh ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya yang tidak memberi ruang bagi masyarakat lemah untuk berbagi kuasa, sehingga struktur ini harus ditinjau kembali, yaitu dengan penjungkirbalikan tatanan yang sudah ada. Semua tatanan dianggap salah, oleh karenanya harus dihancurkan, misalnya memprovokasi masyarakat miskin untuk melawan orang kaya, dan lain-lain.

Konsep ketiga ini sering disebut *critical paradigm*. Pranarka dan Moelyarto mengomentari terkait *critical paradigm* ini, bahwa karena kesalahpahaman mengenai maksud pemberdayaan ini, maka telah menimbulkan pemandangan yang salah, misalnya pemberdayaan adalah proses penghancuran kekuasaan, dan proses pengahancuran pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks masyarakat *duafa'*, Isbandi Rukminto menegaskan bahwa pemberdayaan berarti membantu pihak yang diberdayakan untuk memperoleh daya mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hantaman pribadi maupun sosial, melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki.[36] Oleh karena itu, Hairatunnisa Nasution et al. menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah gerakan penguatan sosial agar masyarakat tadinya lemah, baik dalam bidang sosial, ekonomi, serta politik lalu diberdayakan sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat tersebut, meningkatkan potensi yang mereka miliki dan guna membangun serta menentukan tindakan tertentu yang dapat menjamin keberhasilan hakiki dalam bentuk kemandirian.[37]

Sumaryadi menambahkan, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi: a) mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang, b) memperkuat potensi kemampuan yang dimiliki dengan langkah-langkah nyata untuk mengembangkanya, dan 3) penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang-peluang, termasuk akses ke permodalan.[38].

---

[36] Isbandi Rukminto, *Pemikiran-pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), 162.
[37] Hairatunnisa Nasution, et. al, "Analisis Keuangan Inklusif terhadap Pemberdayan Masyarakat Miskin di Medan", 75
[38] I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: CV. Citra Utama, 2005), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perspektif al-Qur'an, pemberdayaan masyarakat merupakan aspek sosial yang penting karena terkait dengan perubahan masyarakat menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Perubahan suatu masyarakat ini dapat dilakukan diantaranya dengan pemberdayaan masyarakat. Allah Swt. berfirman:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ[39]

> Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain-Nya.[40]

Dari ayat diatas dapat terlihat bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu upaya perubahan ini dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena pemberdayaan ini merupakan usaha riil yang dilakukan dalam bentuk kegiatan yang nyata di tengah masyarakat, yaitu kegiatan yang

[39] al-Qur'an, 13: 11.
[40] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menciptakan kesadaran masyarakat untuk berubah serta memilih kehidupan untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik.[41]

Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan, mendelegasikan otoritas, atau memberi kemampuan dan keberdayaan.[42] Singkatnya, pemberdayaan masyarakat berarti memberikan kekuatan dan akses terhadap sumber daya bagi masyarakat.[43]

**2. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Mathews menyatakan bahwa prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Oleh karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian, prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi pelaksanan kegiatan yang akan dilaksanakan.[44] Jadi, prinsip dalam mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat memiliki urgensitas tersendiri.

Menurut Sri Najiati et. al, terdapat empat prinsip utama yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, antara lain:[45]

---

[41] Tomi Hendra, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif al-Qur'an", dalam http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/Hjk/article/download/744/654, (10 April 2018), 31.
[42] Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 46.
[43] Sirajul Arifin, "Ekonomi Lumbung dan Konstruksi Keberdayaan Petani Muslim Madiun", 190.
[44] Mardikanto dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Penerbit Alfabeta), 105.
[45] Sri Najiati et. al., *Pembedayaan Masyarakat di Lahan Gambut* (Bogor: Weetlands International-Indonesia Programme, 2005), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Kesetaraan.

Prinsip ini bermaksud menciptakan adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan masyarakat, baik antara laki-laki dan perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

Hal ini didasari karena salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pendamping atau pelaksana kegiatan memposisikan dirinya sebagai guru yang serba tahu. Di sisi lain, masyarakat diposisikan sebagai murid yang harus diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan dengan cara mendengarkan yang disampaikan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Padahal, masyarakat justru memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang daerahnya, karena mereka yang selama ini hidup, mengenali, dan merasakan permasalahan yang terjadi di daerahnya. Ini biasa disebut sebagai "kearifan lokal" (*indigenous wisdom*).[46]

b) Partisipasi.

Prinsip ini bermaksud menekankan pentingnya program pemberdayaan yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan,

[46] Sri Najiati et. al., *Pembedayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, 54-55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Broody dan Rogers dalam Sri Najiati et. al. mengatakan bahwa kemandirian masyarakat yang menajdi tujuan pemberdayaan akan tumbuh dalam lingkungan yang partisipatif, banyak menawarkan pilihan sekaligus tantangan dalam mencapai kesempurnaan kepribadian masayarakat. Dengan ini, masyarakat akan terbiasa berpikir kreatif untuk menentukan pilihan yang dianggapnya terbaik dan terbiasa memikul tanggung jawab atas konsekuensi yang timbul karena pilihannya.

Dalam prakteknya, prinsip ini sulit terwujud dengan baik, salah satu faktormya adalah karena pemerintah dan praktisi pemberdayaan masyarakat belum bersedia sepenuhnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan merumuskan kebutuhannya. Mereka terjebak pada keinginan untuk sesegera mungkin melihat hasil pemberdayaan secara fisik. Sementara itu, masyarakat dibebani target untuk mencapai kemajuan yang sangat cepat tanpa memperhitungkan kemampuannya. Tenaga pendamping yang melakukan kegiatan pemberdayaan melihatnya sebagai tugas kelembagaan yang penuh dengan target dan kontrol yang ketat.

Dengan model prinsip semacam ini, mereka menganggap perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat seolah-olah telah dilakukan secara efisien, namun sesungguhnya kemandirian masyarakat tidak dapat tumbuh secara sehat. Oleh karena itu, sering ditemukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proyek-proyek yang dibiayai pemerintah kurang berjalan secara optimal, sedangkan proyek-pproyek swadaya murni yang direncanakan, dibiayai, dan dilaksanakan oleh masyarakat jarang terbengkalai. [47]

Dari sini, prinsip partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk kesuksesan program pemberdayaan ini. Oleh sebab itu, Silkhondze menegaskan bahwa orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok.[48]

c) Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Verhagen menjelaskan, konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak memiliki kemampuan, tapi memandangnya sebagai subjek yang memiliki kemampuan serba sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan tentang kondisi usaha dan lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma masyarakat yang sudah lama dipatuhinya.

---

[47] Sri Najiati et. al., *Pembedayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, 58

[48] Ravik Karsidi, "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro: Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah", *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 3 No. 2, dalam http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/43069/, (29 Juli 2017), 137-138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip ini muncul karena banyak porgram pemberdayaan masyarakat yang menerapkan strategi membagi-bagikan bantuan cuma-cuma (*charity*) daripada penumbuhan kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam membangun upayanya sendiri. Namun, hasilnya kurang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraannya.[49]

d) Berkelanjutan.

Program pemberdayaan masyarakat perlu dirancang untuk memiliki sifat berkelanjutan, karena banyak program pemberdayaan masyarakat dengan skala proyek yang memiliki batas waktu dan pendanaan yang tegas, namun setelah proyek selesai dan pelaksana tidak mau tahu keberlanjutan proyek tersebut. Proyek seperti ini biasanya hanya akan meninggalkan "monumen fisik" yang seringkali membuat masyarakat trauma dan apatis.[50]

World Bank mensyaratkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk terjaminnya pemberdayaan yang berkelanjutan, sebagai berikut:[51]

a) Perbaikan modal finansial, berupa perencanaan ekonomi makro dan pengelolaan fiskal.
b) Perbaikan modal fisik, berupa prasarana, bangunan, mesin, dan lain sebagainya.

[49] Sri Najiati et. al., *Pembedayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, 59
[50] Ibid., 59
[51] Mardikanto dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Perbaikan modal SDM, berupa perbaikan kesehatan dan pendidikan yang relevan dengan pasar kerja.

d) Pengembangan modal sosial, yang menyangkut: ketrampilan dan kemampuan masyarakat, kelembagaan, kemitraan dan norma hubungan sosial yang lain.

e) Pengelolaan sumberdaya alam, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial bagi perbaikan kehidupan manusia termasuk: air bersih, energi, pengelolaan limbah, stabilitas iklim dan beragam layanan penunjangnya.

Untuk mencapai kesukesan dalam pemberdayaan ini, diperlukan penetapan suatu tujuan. Ken Mcelroy mengatakan bahwa tujuan merupakan langkah pertama dalam proses mencapai kesuksesan, dan tujuan juga merupakan kunci kesuksesan.[52] Menurut Sumaryadi, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah: 1) Membantu pengembangan masyarakat lemah menjadi manusia yang otentik dan integral; dan 2) memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dan sanggup berperan serta dalam pengembanan masyarakat.[53]

Edi Suharto juga menjelaskan tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang

[52] Zulkipli dan M. Asdar Andi N., "Tujuan", dalam https://www.scribd.com.document/218588177, (27 April 2018).
[53] I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal seperti persepsi diri sendiri maupun kondisi eksternal seperti ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil.[54] Jadi, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membentuk masyarakat, khususnya kelompok yang lemah untuk menjadi mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup.

**3. Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

Penerima manfaat pemberdayaan masyarakat adalah manusia yang akan diperbaiki mutu kehidupannya. Karena itu, lingkup kegiatan yang diperlukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang harus dikerjakan, tetapi juga harus mencakup hal-hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan kesejahteraan keluarganya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang harus dihadapi ditengah-tengah masyarakatnya.[55]

Tentang lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, Sumadyo merumuskan tiga lingkup kegiatan yang disebutnya sebagai Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Terhadap rumusan ini, Mardikanto menambahkan pentingnya Bina Kelembagaan, karena Tri Bina yang diungkapkan Sumadyo hanya akan terwujud seperti yang diharapkan, manakala didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan.[56]

---

[54] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 60.
[55] Mardikanto dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 222
[56] Ibid., 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat idealnya terdiri dari: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan.[57] Adapun lebih jelasnya sebagai berikut:

a) Bina Manusia

Bina manusia merupakan lingkup kegiatan yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi karena tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan masyarakat. Lingkup kegiatan Bina Manusia dalam pemberdayaan masyarakat difokuskan kepada dua hal:

1) Peningkatan Kemampuan Masyarakat

Peningkatan kemampuan masyarakat yang akan diupayakan melalui pemberdayaan adalah: sikap kewirausahaan, profesionalisme, dan kemandirian. Sikap kewirausahaan diartikan sebagai sikap inovatif, mengacu kepada kebutuhan (masyarakat) pasar, serta optimasi sumberdaya lokal. Dengan kata lain, kemampuan kewirausahaan diarahkan untuk menggaali keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki atau tersedia dilokalitasnya untuk diubah menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*).

Adapun sikap profesional diartikan sebagai terus menerus mengembangkan keahlian sesuai kompetensinya, bangga dan

[57] Mardikanto dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencintai profesinya, serta memegang teguh etika profesinya. Dalam pengertian ini, loyalitas terhadap profesi menjadi lebih penting dibanding sekedar loyalitasnya kepada instansi tempat bekerja.

Sedangkan kemandirian disini tidak hanya diartikan sebagai berdikari (memenuhi kebutuhannya sendiri), melainkan kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan masyarakatnya. Artinya, dalam kemandirian bukan menolak bantuan dari "pihak luar", tetapi dalam arti berani menolak bantuan yang akan merugikan atau akan menciptakan ketergantungan. Meskipun demikian, peningkatan kemampuan masyarakat harus senantiasa mengikuti perkembangan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni) yang bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu produk, meningkatkan efisiensi dan daya saing produk yang dihasilkan.[58]

2) Peningkatan Posisi-Tawar Masyarakat

Dalam upaya peningkatan posisi-tawar, pengorganisasian masyarakat (*community organizing*) akan memainkan peran strategis, tidak hanya untuk menyusun kekuatan bersama (*collective capacity*), tetapi juga dalam membangun jejaring (*networking*) antar pemangku kepentingan yang ada, seperti birokrasi, akademisi, pelaku bisnis, tokoh masyarakat dan lainnya. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa

[58] Mardikanto dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peningkatan daya saing/ tawar yang terbaik adalah membangun sinergi, dengan mengupayakan agar pesaing-potensial dapat dijadikan mitra strategis. Dengan kata lain, pendekatan konflik harus diupayakan untuk diubah menjadi manajemen kolaboratif.[59]

b) Bina Usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam lingkup kegiatan pemberdayaan, sebab bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaaat bagi perbaikan kesejahteraan ekonomi, maka tidak akan bermanfaat. Oleh karena itu, bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakatakan mencakup banyak hal, antara lain:[60]

1) Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk.
2) Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring *kemitraan*.
3) Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal.
4) Peningkatan aksesibilitas terhadap: modal, pasar, dan informasi.
5) Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat.

[59] Ibid., 224
[60] Mardikanto dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bina usaha ini idealnya lebih diprioritaskan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang notabene dikelola oleh pelaku usaha ekonomi yang lemah, baik lemah dalam kepemilikan modal/aset, lemah pengetahuan, lemah ketrampilan dan teknologi yang digunakan, lemah aksesibiltasnya terhadap kebijakan, modal, pasar dan informasi, serta seringkali lemah dalam semangatnya untuk maju. Oleh karena itu, mereka perlu diberdayakan untuk menjadi pelaku usaha yang kuat dan mandiri.[61]

c) Bina Lingkungan

Bina lingkungan ini merupakan lingkup kegiatan yang juga dinilai penting, karena pelestarian lingkungan (fisik) akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasional yang merupakan salah satu prinsip utama dalam pemberdayaan masyarakat. Pengertian lingkungan dalam bina lingkungan ini tidak terbatas pada lingkungan fisik saja, tapi juga menyangkut pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Misalnya, pelatihan pengembangan SDM masyarakat, pembinaan kesehatan masyarakat, pengembangan sarana/ prasarana umum, dan lain sebagainya.

d) Bina Kelembagaan

Bina kelembagaan dalam lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat ini juga sangat penting, karena keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan

[61] Mardikanto dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensyaratkan tersedianya kelembagaan yang berfungsi dengan efektif. Artinya, bina kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi jauh lebih penting adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah dibentuk itu telah berfungsi secara efektif.[62]

**4. Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Tercapainya sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh jenis pendekatan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan tersebut. Dalam hal ini, pendekatan yang dimaksud terkait dengan cara yang digunakan agar supaya masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dapat bersikap terbuka dalam menerima berbagai bentuk inovasi yang dimaksudkan agar mereka dapat melepaskan diri dari berbagai faktor keterbelakangan dan ketertinggalan dalam berbagai sektor masyarakat.[63]

Axin mengartikan pendekatan sebagai suatu gaya yang harus menentukan dan harus diikuti oleh semua pihak dalam sistem yang bersangkutan (*the style of action within a system*). Nagel mengemukakan bahwa, apapun pendekatan yang akan diterapkan, harus memperhatikan:[64]

a. Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Sistem transfer teknologi yang akan dilakukan.

---

[62] Mardikanto dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 226.
[63] Andi Haris, "Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media", *Jupiter*, Vol. XIII, No. 2, dalam http://journal.unhas.ac.id/index.php/jupiter/article/download/, (29 Mei 2018), 55.
[64] Mardikanto dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengembangan sumberdaya manusia/fasilitator yang akan melakukan pemberdayaan.

d. Alternatif organisasi pemberdayaan yang akan diterapkan; publik atau swasta, pemerintah atau non pemerintah, dari atas (birokratis) atau dari bawah (partisipatif), profit atau non profit, dan lain-lain.

Kartasasmita menyatakan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek pembangunan itu sendiri. Berdasarkan ini, pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:[65]

a. Pendekatan Pemihakan. Artinya, upaya pemberdayaan itu harus terarah, ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan kebutuhannya.

b. Pendekatan Partisipatif. Artinya, pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. Tujuannya adalah supaya bantuan tersebut efektif , karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan penerima manfaatnya. Sumaryo G. Saputro menjelaskan:

> "Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan secara partisipatif kiranya sangat sesuai dan dapat dipakai untuk mengantisipasi timbulnya perubahan-perubahan dalam masyarakat beserta lingkungan strategisnya. Sebagai dasar pembangunan partisipatif adalah melakukan upaya pembangunan atas dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat mampu untuk

[65] Mardikanto dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang, dan mengatasi permasalahannya sendiri secara mandiri, berkesinambungan dan berkelanjutan." [66]

c. Pendekatan Kelompok. Artinya, pemberdayaaan dilakukan terhadap sekelompok penerima manfaat. Kelompok digunakan sebagai media intervensi. Pendekatan ini lebih efektif dan dilihat dari penggunaan sumberdaya lebih efisien, karena pendekatan secara individu seringkali menjadikan masyarakat miskin sulit untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya.

Saat ini, pendekatan yang mulai banyak digunakan terutama oleh LSM adalah pendekatan advokasi. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 1960-an di Amerika Serikat. Model pendekatan ini mencoba meminjam pola yang diterapkan dalam sistem hukum, dimana penasehat hukum berhubungan langsung dengan klien (penerima manfaat). Pendekatan advokasi ini menekankan pada peran pendamping agar membantu untuk membuka akses kepada pelaku-pelaku pembangunan lainnya, membantu mereka mengorganisasikan diri, menggalang dan memobilisasi sumberdaya yang dapat dikuasai agar dapat meningkatkan posisi tawar *(bargaining position*) dari kelompok masyarakat tersebut.[67]

Disamping perlunya pendekatan dalam proses pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga perlu dilandasi oleh

[66] Sumaryo G. Saputro dan Kordiyana K. Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 29
[67] Mardikanto dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik,*164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strategi tertentu demi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang dinginkan. Strategi ini sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksankan demi tercapainya suatu tujuan SMenurut Edi Suharto, terdapat lima strategi pemberdayaan masyarakat yang terangkum dalam 5 P, sebagai berikut:

a. Strategi Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Hal ini dilakukan dengan upaya membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
b. Strategi Penguatan, yaitu melalui upaya untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Hal ini dilakukan dengan upaya mengembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat msikin yang menunjang kemandirian mereka.
c. Strategi Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat), dan mencegah terjadinya eksploitas kelompok kuat terhadap yang lemah. Hal ini dilakukan dengan upaya menghapuskan segala jenis diskriminasi yang tidak memihak dan mengutungkan rakyat kecil.
d. Strategi Penyokongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupannya. Hal ini dilakukan melalui upaya menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Strategi Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan melalui upaya untuk menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.[68]

## C. USAHA MIKRO

### 1. Pengertian Usaha Mikro

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu modalnya maksimal 50 juta dengan omset maksimal 300 juta. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria modal maksimal 500 juta dengan omset maksimal 2,5 milyar. Adapun usaha menengah adalah usaha ekonomi

[68] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, 171-172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih maksimal sebesar 10 milyar atau omzet tahunan sebesar 50 milyar.

Menurut Riyana, ciri-ciri usaha mikro adalah: 1) komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti; 2) tempat usahanya belum menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; 3) belum melakukan administrasi keuangan, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; 4) sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; 5) tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah; 6) umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari mereka susah akses ke lembaga keuangan non bank; dan 7) umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.[69] Jadi, usaha mikro ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha kecil maupun menengah. Tujuan pengelompokkan usaha ini pada intinya mencakup empat macam tujuan, antara lain:

a. Untuk keperluan analisis yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan.
b. Untuk keperluan penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah.

[69] Lina Marlina, Biki Zulfikri Rahmat, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya", *Jurnal Ecodemica*, Vol. 2, No. 1, dalam http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/download/3339/, (9 Juni 2018), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Untuk menyakinkan pemilik modal atau pengusaha tentang posisi perusahaannya.

d. Untuk mempertimbangkan badan tertentu berkaitan dengan kinerja perusahaan.[70]

**2. Pengembangan Usaha Mikro Dan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Korten, kesejahteraan dan realisasi diri manusia merupakan jantung konsep pembangunan yang memihak rakyat dan pemberdayaan masyarakat. Perasaan berharga diri yang diturunkan dari keikutsertaan dalam kegiatan produksi adalah sama pentingnya bagi pencapaian mutu hidup yang tinggi dengan keikutsertaan dalam konsumsi produk-produknya.[71] Hal ini merupakan pijakan penting untuk melakukan pengembangan usaha mikro sebagai perantara awal menuju pemberdayaan masyarakat dalam rangka memcapai kemandirian masyarakat.[72]

Menurut Karsidi, pemberdayaan melalui pengembangan usaha mikro lebih ditekankan pada metode *bottom up,* dimana perencanaan lebih diupayakan tertuju kepada sasaran dan dilakukan secara partisipatif. Adapun untuk menggugah partisipasi masyarakat, Karsidi menentukan tahapan yang perlu dilakukan, antara lain:

---

[70] Achmad Rifa'i, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM", *Human Falah,* Vol. 4 No. 2, dalam http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/download/1011/1024, (9 Juni 2018), 198.

[71] David C. Korten, *Pembangunan Yang Memihak Rakyat* (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1984), 15.

[72] Ravik Karsidi, "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro: Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah", 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Identifikasi Potensi. Identifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik sumber daya manusia (SDM) usaha mikro dan lingkungan internalnya, baik lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam (SDA), khususnya yang terkait dengan usahanya dan juga untuk mengetahui lingkungan eksternalnya. Dengan langkah ini, diharapkan setiap gerak kemajuan dapat bertumpu dan memanfaatkan kemampuan serta potensi wilayah masing-masing.
2) Analisis Kebutuhan. Tahap analisis ini dilakukan oleh perwakilan usaha mikro. Hal ini dapat difasilitasi oleh perguruan tinggi/LSM/Swasta, maupun instansi terkait tentang berbagai kebutuhan dan kecenderungan produk dan pasar. Dengan pola analisis seperti ini, diharapkan dapat mendorong terwujudnya kebutuhan usaha mikro selaku individu pengusaha dan sebagai anggota kelompok.
3) Rencana Kerja Bersama. Setelah kebutuhan dapat ditentukan, maka kemudian disusun sebuah rencana program kerja bersama untuk mencapai kondisi yang diinginkan berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan bersama. Dalam tahap ini, Perguruan Tinggi, LSM, Swasta mauoun instansi terkait bertindak sebagai fasilitator.
4) Pelaksanaan Program Kerja Bersama. Tahap ini dilakukan setelah program kerja bersama disepakati. Dalam tahap ini fungsi instansi pemerintah terkait selaku fasilitator, sedangkan Perguruan Tinggi, LSM atau Swasta bertindak sebagai konsultan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Monitoring dan Evaluasi. Tahap terakhir ini tidak hanya berfungsi untuk mengetahui hasil pelaksanaan program kerja bersama tentang apakah yang dikerjakan sudah sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan bersama, akan tetapi juga dipakai untuk membuat penyesuaian-penyesuian jika diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan. [73]

Dari sini, Ravik Karsidi menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, yaitu: 1) belajar dari masyarakat, 2) pendamping sebagai fasilitator, dan 3) saling belajar dan saling berbagi pengalaman. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan usaha mikro tidak bisa secara parsial hanya dalam bidang permodalan saja, tapi juga harus melihat aspek secara keseluruh atas kebutuhan usaha mikro, baik secara individu maupun kelompok termasuk mendasarkan pada potensi sumber daya manusianya.[74]

[73] Ravik Karsidi, "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro: Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah", 141-142.
[74] Ibid., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# SAJIAN DATA PENELITIAN

## A. Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Kediri

### 1. Profil LMI Kota Kediri

Profil LMI Kota Kediri tidak bisa dipisahkan dari sejarah LMI itu sendiri. LMI adalah lembaga filantropi profesional yang berkhidmat mengangkat harkat dan martabat para *mustahiq/ ḍuafā'* melalui penghimpunan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf). Kemunculan LMI ini bermula dari gagasan para alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Program Diploma Keuangan Jakarta yang bekerja sebagai pegawai di lingkungan Departemen Keuangan dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) wilayah Jawa Timur yang melihat perlunya solusi terkait masalah ekonomi dan sosial yang cukup mengkhawatirkan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat di Jawa Timur.

Akhirnya, para alumni menetapkan perlunya suatu lembaga yang mengakumulasi potensi ZISWAF, kemudian melakukan pendistribusian dan pengelolaan secara tepat. Oleh karena itu, pada 17 September 1994 bertempat di Turen, Malang, para alumni sepakat untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah atau disingkat (LMI-UI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak tahun 2005, Yayasan LMI-UI menjadi Lembaga Manajemen Infaq (LMI). Pada tahun yang sama di bulan Mei, LMI dilegalkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) Propinsi Jawa Timur melalui SK Gubernur: 451/1702/032/2005. Setelah itu pada tahun 2009, status legalitas hukumnya ditegaskan oleh SK Menkumham: AHU-1279.AH.01.04 Tahun 2009.

LMI telah berkontribusi dalam berbagai program nasional, baik dalam kegiatan kemanusiaan, sosial maupun kegiatan ekonomi, baik kegiatan *charity* hingga *empowering people* (pemberdayaan masyarakat). Akhirnya, pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016, melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 184 Tahun 2016, LMI resmi diakui sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).[1]

LMI memiliki 27 kantor cabang dan perwakilan yang tersebar di 27 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. LMI berkantor pusat di Jl. Barata Jaya Gg XXII No. 20 Surabaya. Sedangkan kantor cabang dan perwakilan LMI Kota Kediri adalah di Jl. Ronggowarsito No. 28 Pocanan Kecamatan Kota Kediri, Kediri Jawa Timur 64129, Telpon: (0354) 4674499.

Adapun struktur manajemen LMI Kota Kediri sebagai berikut:

a. Pimpinan Utama : Agus Supriyono
b. Keuangan dan Administrasi : Yuni Fitria, Rosita K. Fatmawati

[1] Yuli Arnowo, *Wawancara*, Kediri, 9 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Devisi Penghimpunan : Hidayatul Luthfi, Akung R., Farid F.

d. Devisi Pendayagunaan : Imam Sabudi, Yuli Arnowo, Totok[2]

**2. Visi dan Misi LMI Kota Kediri**

**a. Visi LMI**

Menjadi lembaga yang profesional dalam pemberdayaan dan pelayanan.

**b. Misi LMI**

1) Menghimpun dan mendayagunakan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf) secara profesional dan akuntabel.

2) Meningkatkan peran produktif dan pengaruh konstruktif secara nyata di tengah masyarakat.

3) Memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan.[3]

**c. Program Kerja LMI Kota Kediri**

Sebagai lembaga filantropi yang mengelola dana masyarakat, Lembaga Manajemen Infaq (LMI) mencoba mengkreasikan program-program pemberdayaan sebagai sarana pendayagunaan dana agar memiliki nilai tambah dan manfaat yang berlipat ganda bagi masyaarakat kurang mampu. Hingga saat ini, terdapat lima program utama yang terus dikembangkan LMI. Program-program ini juga berlaku di LMI Cabang, termasuk LMI Kota Kediri.

Lima program yang dimaksud adalah sebagai berikut:[4]

---

[2] Imam Sabudi, *Wawancara*, Kediri, 6 Juni 2018.
[3] Ibid.
[4] Lembaga Manajemen Infaq, *Dokumentasi*, Kediri, 6 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Program Pintar

Program ini merupakan program pemberdayaan LMI yang bergerak di sektor pendidikan baik pendidikan formal ataupun non formal, dengan tujuan agar terbentuk masyarakat *du'afa* yang cerdas dan intelek serta memiliki pemahaman kegamaan yang kuat. Program Pintar ini meliputi:

a) Beasiswa Pintar

Program ini dijalankan untuk pembinaan siswa-siswi (SD, SMP dan SMA) duafa dan berprestasi dalam program yang terpola melalui pemberian beasiswa, bimbingan belajar, bimbingan spritual, pembentukan karakter, entrepreneurship dan wawasan kebangsaan secara berkala sehingga menjadi siswa yang terbaik di sekolah.

b) Guru Pintar

Program pemberdayaan guru melalui kegiatan pelatihan, seminar, forum diskusi, dan pemberian insentif sehingga menjadi guru terbaik di sekolah dan lingkungan

c) Sekolah Pintar

Program pendirian dan pengelolaan sekolah formal untuk memfasilitasi anak-anak *du'afa* yang kesulitan masuk sekolah.

2) Program Dakwah.

Program Dakwah ini bertujuan untuk mengembangkan syiar Islam. Melalui program ini, diharapkan individu dapat meningkatkan nilai beragama di tengah masyarakat. Program ini meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Layanan Dakwah

Program pembinaan masyarakat untuk kembali kepada Islam melalui kegiatan-kegiatan dakwah yang meliputi: tabligh, majelis taklim, pelatihan (kursus Islami), konsultasi agama Islam, pelatihan perawatan jenazah, pelatihan keluarga sakinah, dan lain-lain.

b) Cinta Masjid

Program untuk memakmurkan masjid agar berfungsi seperti masa Rasulullah Saw. yang menjadikan masjid sebagai tempat sholat, pusat pembinaan umat, dan pusat kegiatan dakwah lainnya.

c) Cinta al-Qur'an/ Rumah Tahfidz

Program ini memadukan pendidikan formal dan non-formal dalam rangka mencetak generasi penerus bangsa yang berprestasi akademik dan berakhlak mulia. Program ini meliputi: baca tulis al-Qur'an, menghafal al-Qur'an, wakaf al-Qur'an, sekolah formal dan pemberian bantuan untuk Guru Qur'an.

3) Program Emas.

Program Emas (Ekonomi Masyarakat) merupakan program yang bertujuan untuk pemberdayam masyarakat dibidang keuangan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat *du'afa*. Melalui program ini masyarakat *du'afa* akan diberikan berbagai macam pelatihan dan pembinaan serta bantuan modal usaha untuk mengembangkan unit usahanya. Program ini meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) KUBerdaya

Program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pemberian modal usaha dan pembinaan usaha bagi kelompok yang sudah diseleksi oleh LMI, yang meliputi semua aktivitas yang bersifat membina usaha ekonomi. Dengan program ini diharapkan mampu meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan masyarakat.

b) Sedekah Blusukan

Program mengajak donatur dan memberikan bantuan yang dilakukan secara langsung sesuai kebutuhan kepada mustahiq yang berada di pelosok desa dan daerah terpencil yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

4) Program Yatim

Melalui program ini, diharapkan anak-anak yatim yang merupakan generasi penerus bangsa tidak lagi terlantar. Program ini diwujudkan dalam bentuk program "Cinta Yatim", yaitu program kepedulian untuk anak-anak yatim dalam bentuk penyaluran biaya sekolah dan biaya hidup yang disertai dengan program pembinaan secara berkala yang meliputi pembinaan pendidikan, kepribadian, agama, ekonomi, dan kesehatan.

5) Program Sehati

Program Sehati merupakan program yang bergerak di sektor kesehatan. Melalui program ini, masyarakat duafa akan diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma dengan harapan tercipta masyarakat duafa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sehat dan kuat baik secara jasmani maupun rohani. Program ini meliputi:

a) Rumah Sehati

Sarana layanan kesehatan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan kesehatan khususnya untuk masyarakat kurang mampu. Layanan yang diberikan Rumah Sehati meliputi pemeriksaan dan pengobatan umum, check up kesehatan, khitan, layanan KB dan layanan ibu hamil.

b) Santunan Sehati

Program santunan kesehatan masyarakat duafa dengan meringankan biaya pengobatan yang dialami.

c) Layanan Ambulance

Layanan antar pasien sakit atau jenazah untuk donatur dan masyarakat umum tanpa dipungut biaya.

6) Program Kemanusiaan.

Program ini merupakan program yang disediakan untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah atau bencana alam. Program ini terwujud dalam bentuk:

- Peduli Bencana

Program bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam dalam bentuk tindakan cepat berupa bantuan pangan, medis, fisik, dan rehabilitasi agar kembali pulih menuju kondisi normal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Implementasi Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro di LMI Kota Kediri

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, LMI Kota Kediri menjalankan program ekonomi masyarakat (emas) melalui program yang dinamakan program KUBerdaya. KUBerdaya merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan keuangan inklusif demi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat *du'afa* melalui penghimpunan dana ZISWAF.

KUBerdaya menjadi salah satu program andalan di LMI Kota Kediri. Secara umum, KUBerdaya ini bertujuan untuk membuka akses keuangan kepada masyarakat *du'afa* (kurang mampu). Pendanaan program ini dihimpun dari dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf) yang didistribusikan khusus untuk program ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.[5]

KUBerdaya merupakan wujud upaya pengembangan program ekonomi secara produktif, yaitu upaya menciptakan keuangan inklusif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro. Program ini dijalankan dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha dengan akad *qarḍ al-hasan* yang memiliki angsuran ringan, dan tanpa potongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau dengan menggunakan akad *hibbah*, baik berupa uang tunai atau berupa bantuan alat kerja.

Bagi yang menggunakan pinjaman akad *qarḍ al-hasan*, konsekwensinya mereka dibebani kewajiban membayar angsuran untuk melunasinya sesuai

[5] Yuli Arnowo, *Wawancara*, Kediri, 9 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan nominal yang dipinjamkan berdasarkan kemampuan mereka atas kesepakatan dari kedua belah pihak yang telah dibuat sebelumnya antara penerima bantuan dan pelaksana program dari LMI Kota Kediri. Sedangkan bagi yang menggunakan bantuan *hibbah*, maka tidak dibebani untuk membayar kewajiban angsuran, tapi akan selalu diamati perkembangan usaha mikro yang dijalaninya.

Program ini diperuntukkan bagi para *mustahiq/ duafa'* yang sudah memiliki usaha mikro atau hendak mendirikan usaha mikro. Dengan program ini, diharapkan mereka mampu meningkatkan skala usahanya sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat pula. Biasanya, untuk bantuan alat kerja diberikan LMI kepada *du'afa* yang ingin membuka usaha tapi tidak mempunyai perangkat untuk usaha. Biasanya bantuan alat kerja ini berupa rombong, gerobak untuk jualan keliling, kandang, aki, mesin jahit, kompresor diesel dan lain-lain menyesuaikan keperluan mustahiq.[6]

**a) Penghimpunan KUBerdaya**

KUBerdaya dihimpun dari dana ZISWAF yang disediakan secara khusus untuk digunakan pada program pemberdayaan ekonomi. Dalam prakteknya, ketika permintaan pinjaman modal usaha dan bantuan alat kerja meningkat, sedangkan dana zakat tidak mencukupi, maka menggunakan dana infaq atau *sadaqah* yang khusus disediakan untuk program ekonomi. Bapak

[6] Yuli Arnowo, *Wawancara*, Kediri, 9 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agus Supriyono, selaku pimpinan LMI Kota Kediri pernah menyampaikan dalam sebuah wawancara penelitian, bahwa :

> "Pos dana *qarḍ al-hasan* itu diambil dari pos khusus yaitu zakat yang digunakan untuk program ekonomi. Baru jika ada permintaan qard al-hasan atau alat kerja banyak, sedangkan dana zakat tidak mencukupi, maka bisa menggunakan dana infaq yang khusus untuk program ekonomi, dan bisa juga dari sadaqah, la wong sadaqah itu tidak harus berupa uang tapi kan juga bisa berupa barang atau tenaga, dan yang lain-lain. Jadi, harus jelas antara dana zakat, infaq, sadaqah karena ini amanah dari donatur".[7]

Secara umum, aktivitas penghimpunan di LMI Kota Kediri dilakukan melalui dua cara, yaitu penghimpunan secara langsung dan secara tidak langsung, sebagai berikut:

1. Secara langsung.

   Penghimpunan secara langsung ini dilakukan dengan melakukan penawaran langsung kepada calon donatur atau ke donatur tetap LMI untuk membayarkan ZISWAF-nya. Donatur di LMI Kota Kediri terbagi menjadi dua; donatur personal dan donatur *corporate*.

   Donatur personal disini mencakup individu perseorangan, sedangkan donatur *corporate* seperti DKM (Dewan Kemakmuran Masjid), Bea Cukai Kota Kediri dan lain sebagainya. Adapun menurut keaktifannya, donatur di LMI Kota kediri juga terbagi dua, yaitu donatur aktif dan donatur pasif atau yang lebih sering disebut dengan donatur *insidentil*.

[7] Sukandar, "Model Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pengelolaan Dana Qard al-Hasan: Studi Kasus pada LMI Kota Kediri", 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara tidak langsung.

Penghimpunan ini dilakukan dengan menawarkan kepada calon donatur melalui media-media yang diterbitkan oleh LMI, seperti majalah, buletin, spanduk, brosur, dan juga melalui media sosial, seperti *facebook*, *tweeter*, *blogger*, BBM, juga bekerja sama dengan Radio Andika FM, Radar Kediri, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya berzakat, bersedekah dan kepedulian terhadap sesama agar tumbuh kesadaran pada masyarakat dan akhirnya berkenan untuk menitipkan atau mengeluarkan zakat. Setelah ZISWAF dihimpun dari para donatur, kemudian akan dimasukkan pada posnya masing-masing sesuai dengan program kerja; baik program Dakwah, Pintar, Sehati, Emas, Yatim, ataupun program Kemanusiaan.

**b) Ketentuan Penerima KUBerdaya**

Sebelum LMI Kota Kediri menyalurkan bantuan pinjaman modal usaha dan bantuan alat kerja untuk usaha mikro, maka calon penerima manfaat KUBerdaya harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu, setelah itu dana KUBerdaya dapat dicairkan. Dalam hal ini, Bapak Agus Supriyono selaku pimpinan LMI Kota Kediri sangat menekankan bahwa penerima manfaat lebih prioritas yang memiliki jiwa kewirausahaan. Beliau berkata:

> "Salah satu syarat yang kita pertimbangkan, mustahiq yang punya jiwa kewirausahaan. Ketika kita membantu orang-orang yang *bahasane ubet*, maka bisa dijalankan, berbeda dengan orang yang tidak punya itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sulit dijalankan, mereka mau memulai dari mana? ..... Jadi yang menjadi titik tekan harus memiliki jiwa kewirausahaan"[8]

Adapun ketentuan penerima KUBerdaya di LMI Kota Kediri secara terperinci adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan sebagai penerima KUBerdaya, antara lain:
   - merupakan *mustahiq*, yaitu 8 golongan yang wajib menerima zakat.
   - mempunyai kemauan dan tekad untuk menjadi lebih baik.
   - mempunyai keahlian dasar atau skill.
   - mempunyai jiwa kewirausahaan
   - usahanya sudah berdiri
2) Persyaratan administrasi penerima KUBerdaya, antara lain:
   - foto copy KTP
   - foto copy Kartu Keluarga
   - ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan
3) Tahap proses pengajuan sampai pencairan KUBerdaya, antara lain:
   - marketing menginformasikan ke bagian program
   - pengajuan modal usaha atau bantuan alat kerja dari pihak calon penerima manfaat yang telah direferensikan oleh marketing dengan menyertakan syarat-syarat administrasi
   - data-data kelengkapan diproses
   - akad perjanjian kedua belah pihak

[8] Zakia F. Sukandar, "Model Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pengelolaan Dana Qard al-Hasan: Studi Kasus pada LMI Kota Kediri", 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- mengadakan survei kelayakan selama 7 hari, lalu dana dicairkan setiap awal bulan[9]

**c) Pendayagunaan KUBerdaya**

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa ZISWAF yang disalurkan pihak lembaga LMI kepada para *mustahiq/ ḍuafā'* tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga disalurkan kepada mustahiq untuk berwirausaha melalui penyaluran secara produktif yang kemudian disebut dengan program KUBerdaya. LMI menetapkan dana KUBerdaya yang digulirkan harus digunakan untuk berwirausaha. Dalam jangka 1 bulan sekali, lembaga melakukan pemeriksaan kepada para *mustahiq/ ḍuafā'* yang menerima KUBerdaya dari LMI.

Dengan demikian, penyaluran dengan cara produktif melalui program KUberdaya adalah pemberian bantuan yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan dana ZISWAF yang telah diterimanya.[10] Manfaatnya, para *mustahiq/ ḍuafā'* yang menerima KUBerdaya dari LMI tidak selamanya menjadi seorang *mustahiq* akan tetapi suatu saat nanti dapat menjadi seorang *muzakki*.

Program KUBerdaya senantiasa mendapatkan perhatian dari LMI Kota Kediri, karena dana yang dipinjam dalam bentuk modal bergulir digunakan untuk mendirikan usaha atau untuk memajukan usaha yang didirikan. Dari

[9] Imam Sabudi, *Wawancara*, Kediri, 6 Juni 2018.
[10] Asnaini et al., *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sini jangan sampai dana yang dipinjam oleh para *mustahiq/ ḍu'afā* menggunakan untuk hal-hal yang melanggar aturan agama dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, LMI senantiasa menanyakan terlebih dahulu, untuk apakah dana tersebut, dan setiap satu bulan sekali perwakilan LMI akan mengadakan pemeriksaan terhadapa usaha yang dijalankan oleh para *mustahiq/ ḍu'afā*. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari ketidakpastian dari pengeloaan dana yang dipinjam.

Setiap seminggu sekali, LMI mengadakan pembinaan bagi *mustahiq*. Hal ini bertujuan untuk melakukan pembinaan agar *mustahiq* mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang ilmu agama yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagi penerima ZISWAF produktif akan bermanfaat dalam menjalankan usaha yang sekarang ditekuni.

**d) Target capaian program KUBerdaya**

- para *mustahiq/ ḍuafā'* dapat mandiri, tidak bergantung kepada pihak lain secara kebutuhan ekonomi
- menjadikan para *mustahiq/ ḍuafā'* memiliki kehidupan yang lebih baik.
- menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama, melalui perasaan adanya kewajiban untuk segera melunasi pinjaman karena dana yang dipinjamkan harus digulirkan untuk membantu mustahiq lainnya yang membutuhkan modal usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- menjadikan mereka sebagai seorang *muzakki*, dengan begitu mereka bisa dikatakan berdaya, yang artinya mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempunyai kemandirian serta membantu orang lain.

Oleh karena itu, dengan wujudnya keuangan inklusif yang efisien melalu program KUBerdaya di LMI diharapkan penanggulangan kemiskinan akan semakin berjalan dan perekonomian masyarakat kurang mampu dapat teratasi dengan baik. Sehingga yang pada awalnya masyarakat menjadi *mustahiq* dapat berubah menjadi *muzakki* melalui bantuan/ pinjaman modal usaha untuk berwirausaha.

## C. Implikasi Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro di LMI Kota Kediri

Pada permulaan tahun 2010, program pemberdayaan masyarakat melalui dengan menciptakan keuangan inklusif di LMI Kota Kediri yang diwujudkan dalam bentuk bantuan/ pinjaman modal usaha sebenarnya telah diimplementasikan, tetapi tidak berjalan lama dan sempat vakum. Hal ini dikarenakan pihak manajemen LMI Kota Kediri belum menemukan SDM yang tepat untuk mengelola program ini.

Lalu pada tahun 2012, program pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan keuangan inklusif di LMI Kota Kediri mencoba memberikan pinjaman modal usaha kepada seorang *mustahiq*. Namun, upaya ini belum berhasil, karena pihak yang dipinjami pergi keluar Jawa, sedangkan pihak manajemen memang kurang maksimal dalam mengawasi dan mengontrolnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2013 dengan mulai menemukan operator program dilapangan yang dapat menjalankan program, LMI Kota Kediri akhirnya menciptakan inklusivitas keuangan bagi *du'afa*. Dengan memanfaatkan potensi ZISWAF, LMI menciptakan kemudahan akses keuangan kepada *mustahiq/ du'afa* melalui pemberian pinjaman modal usaha atau bantuan alat kerja dalam rangka mengembangkan usaha mikro yang dijalankannya.[11]

Akhirnya, sepanjang tahun 2013 sampai tahun 2017, dari data yang ditemukan di LMI Kota Kediri, Pak Imam menginformasikan terdapat kurang lebih dua puluh satu penerima manfaat KUBerdaya, antara lain:

**Tabel 3.2**
**Penerima Bantuan KUBerdaya Sejak Tahun 2013 Hingga Tahun 2017 di LMI Kota Kediri**

| No. | Nama | Alamat | Jenis Usaha | Jenis Bantuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retno | Bandar Kidul Mojoroto | Warung Nasi | Rp. 1.000.000 |
| 2 | Puji | Betet Pesantren Kediri | Jual Soto Ayam | Rp. 2.500.000 |
| 3 | Rio | Pasar Setono Betek Kediri | Las Karbit | Rp. 2.000.000 |
| 4 | Mukhlis | Kaliombo Kota Kediri | Jualan Sosis Keliling | Rp. 1.500.000 |
| 5 | Siti Munawaroh | Banjaran Kota | Jual Soto Ayam | Rp. 1.500.000 |
| 6 | Antok | Balowerti Kota Kediri | Jual Nasi dan Mie Goreng | Rp. 3.500.000 |
| 7 | Ponidianto | Manisrenggo Kediri | Kolam Ikan Gurami | Rp. 3.000.000 |
| 8 | Ayub | Kolak Ngadiluwih | Jualan Jus Buah | Rp. 1.000.000 |
| 9 | Mujianto | Ngampel Kota Kediri | Usaha Snack Keliling | Rp. 2.000.000 |

[11] Imam Sabudi, *Wawancara*, Kediri, 6 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Ina | Bandar Lor Kediri | Jajan dan Baju Anak | Rp. 3.000.000 |
| 11 | Yatimah | Jl. Ronggowarsito No. 54 Kediri. | Warung Kopi "Bu Toyib" | Etalase Tempat Lauk Pauk |
| 12 | Edy Kurniawan | Bangsal Pesantren Kediri | Berdagang Es Krim dan Telur, Membuka Jasa Taylor | Uang Tunai Rp. 3.500.000 untuk Pembelian Mesin Jahit 1 Set. |
| 13 | Ika Agustina | Pocanan Kota Kediri | Warung Kopi Do'a Ibu | Pembelian Gerobak |
| 14 | Mulyono | Kelurahan Ngadirejo Kota Kediri | Penjual Martabak Telor | Pembuatan Rombong senilai Rp. 1.000.000, |
| 15 | Minarti | Ngronggo Kota Kediri | Keliling Susu Kedelai dan Roti Bakar di Sekolah | Pembelian Blender dan Teflon |
| 16 | Umi Suryati | Ngronggo Kota Kediri | Penjual Opak Gambir | Modal Usaha Rp. 1.500.000 |
| 17 | Puguh Widodo | Pocanan Kota Kediri | Penjual Mie Ayam "Rombong Ijo" | Pemberian Modal Usaha Rp. 2.000.000 |
| 18 | Hadi Widodo | Kampung Dalem Kota Kediri | Warung Kopi | Pinjaman Modal Usaha Rp. 2.000.000 |
| 19 | Sutrisno | Balowerti Kota Kediri | Penjual Tahu dan Jasa Tambal Ban | Kompresor Diesel |
| 20 | Nanang Qosiam | Balowerti Kediri | Permak (Penjahit Baju, Tas, dll) | Mesin Jahit Baju |
| 21 | Tatik Zunairiyah | Bandar Kidul Mojoroto Kediri | Jual Teh Gelas di Warung Bakso Pak Pur | Alat Pendingin Air Minum Senilai Rp. 3.000.000 |

Dari data penerima KUBerdaya sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 diatas, rata-rata penerima bantuan menerima bantuan dari LMI Kota Kediri telah memiliki usaha mikro sebelumnya. Mereka meminjam modal usaha pada LMI Kota Kediri untuk mengembangkan usahanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implikasi program KUBerdaya sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di LMI Kota Kediri adalah sebagai berikut:

1. **Bu Puji**

   Beliau mengajukan pinjaman modal usaha di LMI Kota Kediri pada tahun 2013 senilai Rp. 2.500.000 untuk berjualan soto. Pendapatan yang diperoleh setiap bulan pasca mendapatkan bantuan modal usaha mengalami kenaikan kira-kira 30% dan sangat merasa terbantu dengan pinjaman yang diberikan LMI. Bu Puji selalu aktif membayar angsuran meskipun tidak rutin setiap bulan. Sayangnya saat usahanya mulai berkembang, suaminya meninggal dunia, akhirnya usahanya ditutup.[12]

2. **Bu Retno**

   Beliau mengajukan pinjaman senilai Rp. 1.000.000 pada tahun 2013 yang digunakan untuk pembelian etalase. Pendapatan yang diperoleh mengalami kenaikan sekitar 40%, dimana sebelum mendapakan bantuan pendapatan Bu Retno Rp. 150.000 naik menjadi Rp. 250.000 pasca mendapatkan bantuan.

   Bu Retno sangat merasa terbantu dengan adanya pinjaman ini karena tampilan warungnya lebih bagus, sehingga lebih menarik para calon pembeli.[13] "Angsuran pinjaman beliau telah lunas pada awal tahun 2014 dan sampai saat ini usahanya masih berjalan", tutur pak Imam[14].

---

[12] Imam Sabudi,*Wawancara,* Kediri, 11 Juni 2018.
[13] Retno, *Wawancara oleh Sukandar,* Kediri, 11 Juni 2014.
[14] Imam Sabudi, *Wawancara,* Kediri, 11 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Pak Rio**

Beliau pemilik bengkel las karbit di pasar setono betek mengajukan pinjaman modal untuk perluasan tempat usaha senilai Rp. 2.000.000 pada tahun 2013. Pendapatan yang diperoleh Pak Rio tidak mengalami kenaikan karena fluktuatif. Tetapi, Pak Rio merasa sangat terbantu karena saat ini tempat usaha yang dijalankan lebih bisa menerima pesanan dengan jumlah yang banyak.[15] "Angsuran Pak Rio telah selesai, dan usahanya saat ini masih terus berjalan", kata Pak Imam[16].

4. **Pak Mukhlis**

Beliau seorang penjual es keliling selama 12 tahun. Merasa pendapatan yang diperoleh selama ini kurang mencukupi, Pak Mukhlis mengajukan pinjaman ke LMI Kota Kediri senilai Rp. 1.500.000 pada pertengahan tahun 2013 untuk menambah usaha berjualan sosis. Uang tersebut kemudian digunakan untuk pembuatan rombong sosis keliling.

Pak Mukhlis merasa sangat terbantu dengan pinjaman dari LMI ini, karena pendapatannya mengalami kenaikan dari awalnya sekitar Rp. 50.000 dari penjualan es keliling menjadi sekitar Rp. 80.000 dari penjualan es keliling dan sosis.[17] "Angsuran Pak Mukhlis telah selesai dan usahanya saat ini masih terus berjalan", kata Pak Imam.[18]

---

[15] Rio, *Wawancara oleh Sukandar*, Kediri, 11 Juni 2014.
[16] Imam Sabudi, *Wawancara*, Kediri, 11 Juni 2018.
[17] Mukhlis,*Wawancara oleh Sukandar*, Kediri, 11 Juni 2014.
[18] Imam Sabudi, *Wawancara*, 11 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Bu Siti Munawaroh**

Bu siti penjual merupakan soto ayam di Banjaran pernah mengajukan pinjaman modal usaha senilai Rp. 1.500.000 pada tahun 2013. Bu Siti ini konsisten membayar angsuran yang dibebankan kepadanya setiap bulan Rp. 150.000. Akan tetapi, karena musbah erupsi gunung kelud pada waktu itu, warung soto Bu Siti rusak dan uang pengahsilan yanh selama ini diperoleh untuk membangun kembali usahanya. Dari sini, pihak LMI kota Kediri membebaskan sisa angsuran Bu Siti.[19]

6. **Pak Antok**

Beliau hendak memulai usaha berjualan nasi goreng pada tahun 2013 mengajukan permohonan pinjaman modal usaha ke LMI Kota Kediri senilai Rp. 3.500.000. Uang pinjaman akan dipakai untuk membuat rombong nasi goreng. Usaha yang dilakukannya cukup berjalan. Sayangnya, Pak Antok belum bisa melakukan pencicilan sama sekali karena hasilnya habis buat untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan modal usaha lagi.[20] Berjalannya waktu, Pak Imam mengaku sudah tidak ada kelanjutan tentang usaha berjualan nasi goreng ini.[21]

7. **Pak Ponidianto**

Beliau adalah seorang peternak ikan gurami yang mengajukan pinjaman modal untuk mempermudah membeli pakan dan bibit ikan gurami

[19] Siti, *Wawancara oleh Sukandar*, Kediri, 11 Juni 2014.
[20] Anthok, *Wawancara oleh Sukandar*, Kediri, 11 Juni 2014.
[21] Imam Sabudi, *Wawancara*, Kediri, 11 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senilai Rp. 3.500.000 pada tahun 2014. Pendapatan kotor yang diperoleh Pak Ponidianto belum mengalami kenaikan yang signifikan. Angsuran pinjaman Pak Ponidianto dibayarkan setiap pasca panen dan saat ini angsurannya dalam sudah selesai.[22] Menurut Pak Imam, Usaha ikan gurami Pak Ponidianto masih eksis dan berjalan sampai saat ini.[23]

8. **Pak Ayub**

Beliau adalah seorang penjual es jus buah di depan pasar setono betek yang awalnya hanya berjualan pagi sampai sore hari dengan perolehan pendapatan Rp. 75.000/hari. Selama ini Pak Ayub tidak mampu berjualan pada malam hari karena problem saluran listrik untuk blendernya.

Akhirnya, Pak Ayub mengajukan pinjaman modal ke LMI Kota Kediri senilai Rp. 1.000.000 pada awal tahun 2014 untuk membeli aki agar dapat berjualan di malam hari. Menurutnya, pinjaman modal dari LMI ini sangat gmembantu, sehingga pendapatannya naik menjadi Rp. 150.000/hari.

Sayangnya, Pak Ayub belum bisa membayar angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan oleh LMI kota Kediri. Karena itu, hasil penjualan sebagian besar digunakan untuk membantu pembangunan rumah saudaranya.[24] Informasi dari Pak Imam menyebutkan, bahwa saat ini usaha Pak Ayub yang dijalankan tidak ada kabar kelanjutan kerjasama dengan pihak LMI Kota Kediri.[25]

---

[22] Ponidianto, *Wawancara oleh Sukandar*, Kediri, 11 Juni 2014.
[23] Imam Sabudi, *Wawancara*, Kediri, 11 Juni 2018.
[24] Ayub, *Wawancara oleh Sukandar*, Kediri, 11 Juni 2014.
[25] Imam Sabudi, *Wawancara*, Kediri, 11 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**9. Pak Mujianto**

Beliau adalah seorang pengusaha yang berjualan snack keliling yang mensuplai barang dagangannya ke sekolah, warung, kantor instansi pemerintahan, bank dan beberapa toko. Setiap bulan Pak Mujianto memperoleh pendapatan sekitar Rp. 2.500.000.

Saat mendekati Hari Raya Idul Fitri, Pak Mujianto mengajukan pinjaman untuk tambahan modal usaha membeli snack senilai Rp. 2.000.000. Pasca memperoleh pinjaman, perolehan pendapatannya naik menjadi Rp. 3.000.000/bulan.[26] Menurut Pak Imam, angsuran Pak Mujianto selalu dibayarkan tepat waktu setiap bulan dan saat ini sudah selesai. Sampai saat ini usaha yang dijalankan masih eksis dan berjalan dengan baik.[27]

10. **Bu Ina**

Beliau adalah seorang penjual bubur tim untuk bayi. Saat di bulan Ramadhan, Bu Ina mengajukan pinjaman modal untuk menambah penghasilan dengan berjualan kue lebaran dan baju anak-anak senilai Rp. 3.000.000 pada tahun 2014. Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan kue lebaran dan baju anak-anak setelah ramadhan sekitar Rp. 3.000.000 atau bisa dikatakan balik modal.[28] Sayangnya, menurut Pak Imam, usahanya sudah tidak ada kelanjutan dan realisasi kerjasama lagi dengan pihak LMI Kota Kediri.[29]

---

[26] Mujianto, *Wawancara oleh Sukandar*, Kediri, 11 Juni 2014.
[27] Imam Sabudi, *Wawancara*, Kediri, 11 Juni 2018.
[28] Ina, *Wawancara oleh Sukandar*, Kediri, 11 Juni 2014.
[29] Imam Sabudi, *Wawancara*, Kediri, 11 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. **Bu Yatimah**

Beliau menjalankan usaha warung kopi "Bu Thoyib" sejak tahun 1977. Buka mulai jam 06.30-17.00, perolehan pendapatan mencapai sekitar 600.000/bulan. Bu Yatimah mendapatkan bantuan alat kerja dari LMI Kota Kediri dengan akad *hibbah*.

Menurutnya, setelah mendapat bantuan tersebut, usaha warung yang dikelolanya mengalami peningkatan pendapatan sekitar 20%. Ekonomi keluarga juga ikut mengalami peningkatan dan usahanya masih berjalan sampai saat ini.[30]

12. **Pak Nanang Qosim**

Beliau seorang penjahit dan permak baju, tas, koper, jaket, dompet, dan lain-lain pada tahun 2107 ditawari oleh Bu Luthfi untuk mengajukan bantuan modal usaha atau alat kerja. Akhirnya setelah pengajuan, Pak Nanang mendapatkan mendapat bantuan alat kerja berupa mesin jahit dalam bentuk akad *hibbah*.

Setelah itu, usaha Pak Nanang lebih dikenal, pendapatannya lebih meningkat hasilnya sekitar 40% dan usaha yang dijalankan lebih baik dan lancar dari pada sebelumnya. Menurut Pak Nanang, bantuan dari LMI ini sangat membantu dan bermanfaat. Kualitas mesin jahit yang diberikan oleh pihak LMI lebih baik dari yang sebelumnya sehingga kinerja lebih baik.[31]

[30] Yatimah, *Wawancara*, Kediri, 11 Juni 2018.
[31] Nanang Qosim, *Wawancara*, Kediri, 11 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. **Pak Puguh Widodo**,

Beliau berjualan mie ayam “”Rombong Ijo” sejak Februari 2015, pada tahun 2017 memperoleh bantuan dana hibah senilai Rp. 2.000.000 dari LMI Kota Kediri yang dipergunakan untuk tambahan modal usaha. Dengan bantuan ini, penghasilan Pak Puguh semakin meningkat mencapai sekitar 1.500.000/bulan dari 1.200.000/bulan. Pak Puguh merasa bantuan yang diberikan LMI sangat membantu dan bermanfaat sekali untuk kebaikan ekonomi keluargamya.[32]

14. **Pak Sutrisno**

Beliau awalnya seorang penjual tahu. Semenjak semakin bertambahnya jumlah penjual tahu, penghasilan Pak Sutrisno semakin berkurang. Akhirnya Pak Sutrisno mencoba menjadi produsen sangkar burung. Untuk mendukung alat produksi sangkar burung, Pak Sutrisno diberi hibah bantuan alat kerja oleh LMI Kota Kediri berupa mesin kompresor diesel. Kompresor diesel ini dipakai untuk mengecat sangkar burung.

Tetapi, usaha produksi sangkar burung sudah tidak jalan, akhirnya kompresor dieselnya dipakai untuk tambal ban. Jadi, usaha Pak Sutrisno saat ini adalah tambal ban dan berjualan tahu. Pak Sutrisno merasa sangat terbantu dengan keberadaan LMI Kota kediri, meskipun belum bisa mengangkat kondisi ekonomi keluarganya.[33]

---

[32] Puguh Widodo, *Wawancara*, Kediri, 11 Juni 2018.
[33] Sutrisno, *Wawancara*, Kediri 11 juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15. **Hadi Widodo**

Beliau membuka usaha warung kopinya sejak tahun 2009/2010 yang buka mulai sore hari, karena pagi harinya kerja di pabrik krupuk. Tetapi, semenjak pabrik krupuk tutup, Pak Widodo hanya mengandalkan usaha warung kopi. Untuk mengembangkan usaha warung kopinya, melalui arahan dan petunjuk yang diberikan Pak Yuli di LMI Kota Kediri, Pak Widodo disarankan untuk mengajukan bantuan modal usaha ke LMI Kota Kediri pada tahun 2016. Akhirnya, LMI memberi bantuan pinjaman modal usaha senilai Rp. 2.000.000.

Semenjak mendapatkan bantuan dari pihak LMI Kota Kediri, sebenanya usaha warung kopi yang dijalankannya berjalan dengan baik dan hasil yang didapatkan cukup memuaskan, beban angsuran kepada LMI Kota Kediri juga sudah mulai dicicil, namun setelah orang tuanya meninggal, beban ia harus menanggung kebutuhan adik-adiknya. Oleh karena itu, hasil usahanya lebih banyak untuk kebutuhan mencukupi kebutuhan adik-adiknya. Saat ini keluarganya sudah mandiri semua.

Pak Widodo sangat merasa terbantu dengan pinjaman modal dari LMI, karena usaha yang dijalankan mengalami peningkatan. Akan tetapi, bersamaan dengan perkembangan konsep usaha warung kopi yang memakai fasilitas wifi, saat ini usaha Pak Widodo cukup terancam, meskipun sampai saat ini masih eksis dan tetap berjalan dengan konsep apa adanya. [34]

[34] Hadi Widodo, *Wawancara*, Senin, 11 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16. **Bu Minarti**

Beliau seorang janda yang harus membiayai 3 anaknya. Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, Bu Minarti harus bekerja serabutan; jika ada yang bisa dikerjakan, maka dia kerjakan. Pada tahun 2017 melalui Pak Yuli, Bu Minarti diberi bantuan *hibbah* berupa modal usaha senilai Rp. 700.000. Kemudian, Bu Minarti membeli blender dan teflon yang dibuat untuk produksi susu kedelai dan roti bakar yang dititipkan di sekolah dan sisanya buat beli bahan produksinya.

Sejak itu, kehidupan Bu Minarti menjadi lebih baik, hasil usahanya dapat dipakai untuk mencukupi kebutuhan rumah dan anak-anaknya. Menurutnya, bantuan ekonomi dari LMI sangat membantu merubah kondisi ekonomi keluarganya. Meskipun demikian, Bu Minarti masih mengalami kendala belum memiliki kulkas, karena susu kedelai harus disajikan dalam keadaan dingin.[35]

17. **Bu Umi Suryati**

Beliau berjualan opak gambir sejak tahun 2012. Setiap bulan Ramadhan, tuntutan produksi opak gambir meningkat. Tetapi, Bu Umi mengalami kendala modal produksi yang kurang memadai. Melalui informasi teman-temannya, Bu Umi akhirnya mengajukan pinjaman modal usaha ke LMI pada tahun 2015 senilai Rp. 250.000. Setelah angsuran selesai, Bu Umi mengajukan kembali pada tahun 2017.

[35] Minarti, *Wawancara*, Kediri, 12 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhirnya Bu Umi mendapatkan pinjaman modal senilai Rp. 500.000, dan dalam waktu yang berbeda mendapatkan lagi pinjaman senilai Rp. 1.500.000, jadi total bantuan pinjaman yang diberikan LMI senilai Rp. 1.500.000. Kendala dalam menjalani usaha berjualan opak gambir ini adalah masalah pemasaran. Menurut Bu Umi, Pak Yuli salah seorang pelaksana program ekonomi di LMI membantu dalam memasarkan opak gambirnya. Meskipun peningkatan hail tidak begitu signifikan, tapi hasil yang diperoleh mengalami peningkatan kuantitas yang lebih baik dari sebelumnya.[36]

18. **Bu Tatik Zunairiyah**

Pada awalnya beliau berjualan es teh di salah satu warung bakso yang bernama "Pak Pur". Pada tahun 2017 mengajukan pinjaman modal usaha senilai Rp. 2.000.000 melalui anjuran Bu Luthfi. Uang pinjaman ini kemudian dibelikan kulkas dan alat khusus untuk tutup plastik gelas teh. Kemudian teh gelas tersebut diletakkan didalam kulkas yang ditaruh didalam warung bakso.

Menurut Bu Tatik, sebelum memiliki kulkas, pendapatan kotor yang diperoleh sekitar Rp. 250.000/hari dan mengalami kenaikan setelah memiliki kulkas sekitar Rp. 400.000/hari. Bu Tatik selalu aktif membayar angsuran Rp. 200.000 setiap bulan, dan saat ini masih dalam proses pengangsuran. Menurutnya, bantuan LMI Kota Kediri melalui program KUBerdaya sangat

[36] Umi Minarti, *Wawancara*, Kediri, 12 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermanfaat karena telah mampu meningkatkan nilai jual usaha yang telah dijalankannya selama ini.[37]

19. **Bu Ika Agustina**

Beliau mengajukan pinjaman modal usaha senilai Rp. 2.000.000 untuk membuka usaha warung kopi. Uang ini kemudian dibelikan rombong, alat-alat memasak dan menyeduhkan kopi, seperti sendok, cangkir dan lain-lain. Warung kopi Bu Ika buka mulai jam 07.00-18.00. Angsuran yang dibayarkan tiap bulan senilai Rp. 200.000.

Tetapi, sesuai dengan saran pihak LMI, Bu Ika belum mengangsur karena untuk membeli kebutuhan yang lain seperti kursi buat pembeli, tabung gas, kompor gas, dan lain-lain hingga usaha Bu Ika benar-benar telah berkembang mandiri. Menurutnya, pinjaman modal usaha ini sangat membantu perekonomian keluarga Bu Ika.[38]

20. **Pak Edy Kurniawan**

Beliau seorang penjual es krim Diamond di alun-alun Kota Kediri dan setiap ada momen acara tertentu. Untuk mengembangkan usahanya, Pak Edy mengajukan pinjaman senilai Rp. 3.500.000 pada pertengahan bulan tahun 2017 yang digunakan untuk membeli jenset, karena selama ini mengalami kesulitan saluran listrik ketika berjualan es krim.

[37] Tatik Zunairiyah, *Wawancara*, Kediri, 12 Juni 2018.
[38] Ika Agustina, *Wawancara*, Kediri, 13 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, pangsa pasar yang mulai menurun, dan sulitnya pemasaran, Pak Edy sudah hampir tidak pernah berjualan es krim. Saat ini, Pak Edy menjalani pekerjaan serabutan untuk membuat pagar, bangunan, dan jenset yang dibeli terkadang dipakai untuk membantu aktifitasnya yang saat ini, seperti las dan memasang pagar. Disebabkan oleh pekerjaan yang belum tetap dan hasil yang belum pasti, Pak Edy belum membayar kewajiban angsuran.[39]

21. **Pak Mulyono**

Beliau mengajukan pinjaman untuk membuka usaha berjualan Maklor (Martabak Telor) keliling ke beberapa sekolahan senilai Rp. 3.000.000 dengan rincian Rp. 2.000.000 untuk pembuatan rombong, Rp. 1.000.000 untuk modal bahan baku, dan Rp. 3.000.000 untuk kontrak rumah. Jadi, total pinjaman yang diajukan sebesar Rp. 6.000.000. Dari pengajuan ini, pihak LMI hanya menyetujui memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000. Uang ini kemudian dibuat untuk membuat rombong dan membeli bahan baku Maklor. Menurutnya, uang yang dipinjamkan sangat kurang, karena keinginan membuat rombong yang lebih baik dan terkesan lebih bagus tampilannya tidak bisa. Jadi, pinjaman ini cukup membantu keluarga Pak Mulyono untuk meningkatkan ekonominya, meskipun beliau tampak kecewa dengan nominal pinjaman yang terlalu kecil. Meskipun demikian, dia sudah membayar angsuran 4x dengan total Rp. 450.000.[40]

[39] Edy Kurniawan, *Wawancara*, Kediri, 13 Juni 2018.
[40] Mulyono, *Wawancara*, Kediri, 13 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS DATA PENELITIAN

## A. Analisis Implementasi Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro di LMI Kota Kediri

Program keuangan inklusif dengan memberi pinjaman modal usaha dan bantuan alat kerja kepada para *mustahik/ du'afa* sudah dijalankan sejak berdirinya LMI di Surabaya. Program ini di LMI Kota Kediri dimulai sejak tahun 2010 sampai sekarang. Sebelumnya, program ini lebih dikenal dengan sebutan "Bantuan Emas" atau Bantuan *qard al-hasan*. Sekarang, program ini disebut dengan program KUBerdaya. Sejak bergulir secara baik mulai tahun 2013 hingga tahun 2017, program KUBerdaya telah mampu memberikan layanan keuangan inklusif kepada lebih dari dua puluh satu orang.

Keuangan inklusif yang diwujudkan melalui program KUBerdaya di LMI Kota Kediri ini ditujukan pada dasarnya untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro.[1] Sebagai lembaga filantropi Islam, LMI Kota Kediri dalam menjalankan program KUBerdaya ini hendak mendayagunakan potensi ZISWAF untuk menciptakan keuangan yang inklusif sebagai karakteristik keuangan shariah.

[1] Imam Sabudi, *Wawancara*, Kediri, 11 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam aspek pendayagunaan atau pendistribusian ZISWAF, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran, yaitu pola konsumtif dan pola penyaluran produktif. Secara khusus, penyaluran produktif bertujuan untuk mengubah keadaan penerima manfaat dari kategori mustahik menjadi muzakki.[2] KUBerdaya yang menjadi tipologi keuangan inklusif di LMI Kota Kediri dalam mendayagunakan potensi ZISWAF menggunakan pola penyaluran produktif.

Pola produktif ini juga dijelaskan oleh Ali Hasan, ia mengatakan bahwa zakat (instrumen keuangan shariah) yang didistribusikan secara produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.[3] Pola penyaluran atau pendayagunaan produktif ini juga telah disampaikan oleh para Fuqaha seperti Imam as-Shafi'i, Imam an-Nasa'i, dan lainnya yang menyampaikan bahwa jika mustahik memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memberi kemungkinan untuk memperoleh keuntungan yang dapat memnuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya.[4]

Affar berpendapat, melalui pola penyaluran produktif, instrumen keuangan shariah akan mampu membuka akses kepemilikan bagi mustahik atau

---

[2] Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, 122.
[3] Didin Hafiddudin, et al., *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 13.
[4] Didin Hafiduddin, *Anda Bertanya Zakat, Infaq, Sedekah: Kami Menjawab* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duafa' berupa sarana produksi atau usaha, baik dengan pemberian akses keuangan yang berupa pinjama modal usaha atau akses barang berupa bantuan alat kerja.[5] Dari sini, sebenarnya ZISWAF dapat berperan menjadi instrumen keuangan inklusif untuk mendukung strategi dan mewujudkan visi nasional keuangan inklusif.

Jadi, pola produktif dalam KUBerdaya di LMI Kota Kediri diwujudkan dalam bentuk pinjaman modal usaha mikro atau bantuan alat kerja bagi masyarakat miskin dan lemah (*duafa'*) yang ingin mendirikan usaha atau mengembangkan usaha mikro yang telah ada sebelumnya. Pemberian pinjaman modal usaha atau bantuan alat kerja di LMI Kota Kediri melalu program KUBerdaya bagi calon penerima bantuan harus melalui pengajuan dan memenuhi persyaratan tertentu, yang meliputi: a) syarat penerima bantuan, dan b) syarat administrasi.

Meskipun demikian, hal yang lebih ditekankan bagi calon penerima bantuan KUBerdaya ini salah satunya adalah memiliki jiwa kewirausahaan. Menurut pak Agus -pimpinan LMI Kota Kediri-, seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan itu minimal dapat menentukan konsep usaha yang ingin dikembangkan, dan lebih mampu mengelola dan bantuan yang diberikan, sehingga ada potensi keberlanjutan usaha yang dijalaninya yang akhirnya dapat merubah status penerima bantuan dari kelompok mustahik menjadi kelompok *muzakki*.

[5] 'Abdul Mun'im 'Affār, *at-Takhtīṭ wa at-Tanmiyyah fī al-Islām*, 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, LMI Kota Kediri sangat memperhatikan karakteristik calon penerima bantuan. Pentingnya perhatian potensi dan kemampuan calon penerima bantuan dalam mengelola dana bantuan yang diberikan juga disampaikan oleh Ali Hasan. Ia mengatakan bahwa pemberian modal kepada seseorang juga harus dipertimbangkan dengan matang oleh amil, apakah yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk mengelola dana yang diberikan, sehingga pada suatu saat dia tidak bergantung pada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil, maka secara berangsur-angsur, mustahik akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan akan bisa menjadi muzakki.[6]

Setelah persyaratan terpenuhi, maka pelaksana porgram KUBerdaya melakukan survei lapangan terkait keadaan riil yang ada pada calon penerima bantuan. Hasil survei yang diperoleh kemudian dibahas dalam rapat bidang program ekonomi masyarakat, lalu seandainya telah dinyatakan memenuhi pesyaratan, maka pemberian bantuan akan disetujui dan diberikan kepada calon penerima bantuan.

Setelah bantuan modal usaha atau bantuan alat kerja telah diberikan, maka agenda pelaksana KUBerdaya selanjutnya melakukan pendampingan. Upaya pendampingan dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan kunjungan tiap bulan serta melakukan evaluasi untuk melihat perkembangan usahanya.[7]

---

[6] Ali hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan: Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 41-42.
[7] Imam Sabudi, *Wawancara*, Kediri, 11 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro di LMI Kota Kediri dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku usaha itu sendiri.[8] Untuk mewujudkan program pemberdayaan pelaku usaha sebagai sasaran kegiatan yang hendak dicapai, maka perlu menentukan pendekatan yang digunakan dalam menjalankan program tersebut. Pendekatan yang dimaksud adalah cara yang digunakan agar masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan bersikap terbuka dalam menerima inovasi yang ditujukan agar mereka dapat diberdayakan.[9]

Dalam konteks ini, melalui observasi di lapangan, LMI dalam mengimplementasikan program ekonomi KUBerdaya mencoba mengikuti pendekatan Kartasasmita dalam konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu masyarakat dalam hal ini tidak dijadikan objek, tapi merupakan subjek.[10] Tiga pendekatan yang dimaksud adalah:

1. Pendekatan pemihakan. Pendekatan ini mengupayakan agar yang dilakukan oleh LMI terarah, dan tertuju langsung kepada *mustahiq/ duafa'* dengan program yang sengaja dirancang untuk mengatasi masalah dan kebutuhan dasar mereka.
2. Pendekatan partisipatif. Melalui pendekatan ini, LMI dalam mengimplementasikan program KUBerdaya mengikutsertakan partisipasi

[8] Ravik Karsidi, "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro: Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah", 141.
[9] Andi Haris, "Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media", 55.
[10] Mardikanto dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik,* 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*mustahiq/ duafa'*. Pendekatan partisipatif ini memiliki keunggulan, yaitu bantuan yang diberikan lebih efektif, karena dalam menentukan bantuan disesuaikan dengan kehendak, kemampuan dan kebutuhan penerima manfaatnya.

3. Pendekatan kelompok. LMI menetapkan bahwa pemberdayaan ini ditujukan khusus pada sekelompok tertentu, yaitu *mustahiq atau duafa'* yang telah memilki usaha mikro, atau belum memiliki usaha, tapi memilki jiwa kewirausahaan dan ingin memulai usaha.

Meskipun telah melakukan sebuah pendekatan, dalam implementasinya nanti akan berhadapan dengan kondisi beragam yang dialami oleh para *mustahiq/ duafa'.* Oleh karena itu dibutuhkan sebuah prinsip pemberdayaan, yaitu suatu pernyataan tentang kebajikan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan mengimplementasikan program tersebut.[11]

Menurut Sri Najiati et al., terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk kesuksesan program pemberdayaan ini.[12] Empat prinsip ini juga tampak pada upaya LMI dalam mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalu program KUBerdaya ini.

**Pertama**, prinsip kesetaraan. LMI melalui KUBerdaya memperlakukan sama bagi laki-laki maupun perempuan yang hendak mengajukan pinjaman atau bantuan. Tidak hanya itu, LMI juga memberikan keleluasan bagi para *mustahiq/*

[11] Mardikanto dan Purwoko, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 105.
[12] Sri Najiati et al., *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*duafa'* untuk menentukan usaha yang hendak dijalankan sesuai dengan kearifan usaha lokal yang ada.

**Kedua**, prinsip partisipatif. LMI ikut memantau perkembangan kondisi calon penerima manfaat, dan memiliki porgram pemantauan kondisi penerima manfaat setelah mendapatkan pinjaman modal atau bantuan alat kerja. Meskipun demikian, upaya LMI ini masih belum disertai dengan menciptakan langkah yang partisipatif, terencana, diawasi dan dievaluasi secara baik. Hal ini terlihat dari beberapa pengakuan penerima manfaat yang kurang lagi diperhatikan kondisi usahanya dan tidak adanya pendampingan atau pelatihan skill usaha bagi mereka setelah mendapatkan pinjaman dari pihak LMI Kota Kediri.

**Ketiga**, prinsip kemandirian. Upaya LMI dengan penyaluran ZISWAF secara produktif melalui pengembangan usaha mikro sebenarnya merupakan wujud upaya menciptakan kemandirian. Sayangnya, upaya ini belum disertai dengan keberlangsungan hasil dari manfaat yang telah diberikan kepada *mustahiq/ duafa'*.

**Keempat**, prinsip keberlanjutan. World Bank telah mensyaratkan empat syarat untuk menjamin terciptanya pemberdayaan yang berkelanjutan, meliputi perbaikan modal finansial berupa perencanaan ekonomi makro, perbaikan modal fisik berupa sarana dan prasarana usaha, perbaikan modal SDM, dan pengembangan modal sosial yang menyangkut ketrampilan dan kemampuan masyarakat. LMI melalui KUBerdaya dalam mewujudkan prinsip berkelanjutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih tampak kesulitan. Hal ini berdasarkan dari peninjauan langsung terkait pernyataan *mustahiq/ duafa'* yang telah menerima manfaat ZISWAF melalui program KUBerdaya di LMI Kota Kediri.

*Mustahik/ du'afa'* sebagai penerima bantuan program KUBerdaya untuk pemberdayaan masyarakat adalah kelompok atau individu yang akan diperbaiki mutu kehidupannya. Karena itu, lingkup kegiatan yang diperlukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang harus dikerjakan, tetapi juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan kesejahteraan keluarganya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang harus dihadapi ditengah-tengah masyarakatnya.[13]

Lingkup kegiatan yang dimaksud disini adalah yang dirumuskan oleh Sumadyo berupa Tri Bina; bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan ditambahkan oleh Mardikanto dengan bina kelembagaan.[14] Bina manusia yang dimaksud terarah kedalam dua tujuan, yaitu peningkatan kemampuan *mustahiq/ duafa'* dan peningkatan posisi-tawar mereka. Peningkatan kemampuan masyarakat dijalankan untuk memunculkan jiwa kewirausahaan, profesionalisme dan kemandirian.

Jiwa kewirausahaan disini diarahkan untuk menggali keunggulan komparatif yang dimiliki oleh para mustahiq dan duafa', jiwa profesionalisme

[13] Mardikanto dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 222.
[14] Ibid., 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditujukan untuk mengembangkan keahlian sesuai kompetensinya, bangga dan memegang teguh etika profesinya, dan jiwa kemandirian dicapai untuk memunculkan keberanian mustahiq dan duafa' dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi diri mereka. Dalam implementasinya, KUBerdaya meskipun telah mendorong adanya jiwa kewirausahaan dan jiwa kemandirian, namun belum menanamkan jiwa profesionalisme kepada para *mustahiq/ duafa'*.

Terkait peningkatan posisi tawar *mustahiq/ duafa'* yang dimaksud adalah upaya peningkatan daya saing yang terbaik dengan menyusun kekuatan bersama dan memainkan peran strategis untuk membangun sinergi melalui upaya menjadikan pesaing potensial menjadi mitra. Lingkup kegiatan KUBerdaya dalam implementasinya belum mengarah pada upaya realisasi peningkatan ini.

Setelah bina manusia ini ditetapkan, maka kemudian harus memperhatikan bina usaha, karena bina manusia tanpa memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan adalah sesuatu yang kurang bermanfaat. Meskipun KUBerdaya memiliki upaya pengembangan usaha mikro, tetapi dalam implementasinya masih belum memiliki konsep bina usaha. Konsep bina usaha yang dimaksud adalah menciptakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

1. Peningkatan pengetahuan teknis melalui peningkatan produktifitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk.
2. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha dan jejaring kemitraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis.
4. Peningkatan aksesibilitas terhadap: modal, pasar, dan informasi.
5. Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat.

Untuk bina lingkungan dilakukan dalam rangka menjaga dan menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasional usaha yang dijalankan oleh para *mustahiq/ duafa'*. Pengertian lingkungan disini mencakup lingkungan fisik, pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Lingkup kegiatan yang termasuk dalam bina lingkungan meliputi bantuan pendidikan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan sarana/ prasarana umum dan lain-lain. Meskipun terdapat program Sehati, program Pintar, program Kemanusiaan, namun program ini terpisah dari program KUBerdaya. Jadi, para *mustahiq/ duafa'* yang memperoleh manfaat dari KUBerdaya sedikit sekali yang mendapatkan layanan selain program KUBerdaya, sehingga hasil pemberdayaan para *mustahiq/ duafa'* belum berjalan maksimal.

Ketika Tri Bina: bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan sudah dijalankan, maka lingkup kegiatan selanjutanya adalah melaksanakan bina kelembagaan, karena keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui Tri Bina mensyaratkan tersedianya kelembagaan yang berfungsi dengan efektif. Dalam hal ini, efektivitas LMI Kota Kediri dalam menjalankan program KUBerdaya harus ditingkatkan, dan jika perlu mengadakan kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga keuangan formal lain seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbankan Sharī'ah, dan lain-lain untuk menutupi kelemahan dan kekurangan LMI Kota Kediri dalam menjalankan program KUBerdaya.

Secara umum, program ekonomi KUBerdaya di LMI Kota Kediri sebenarnya telah mampu mewujudkan visi nasional keuangan inklusif untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan secara khusus telah mendorong terciptanya keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro. Sayangnya, pengelolaan program belum berjalan secara efisien, sehingga tujuan yang dicapai belum maksimal.

Pengelolaan program yang belum berjalan secara efisien dapat dilihat melalui indikator kinerja keuangan inklusif. Adapun indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut: **Pertama,** indikator ketersediaan akses.[15] Meskipun LMI telah membuka ruang akses keuangan kepada lapisan masyarakat yang paling bawah dan paling tidak terjangkau oleh lembaga keuangan secara umum, namun melihat kecilnya nominal yang diberikan dan kesulitan membayarkan kewajiban angsuran yang dibebankan kepada para mustahiq menunjukkan bahwa program KUBerdaya dengan memaksimalkan potensi ZISWAF ini belum berjalan sesuai harapan.

**Kedua,** indikator penggunaan.[16] Secara implementatif, kemudahan penggunaan jasa keuangan di LMI Kota Kediri tidak terjadi secara teratur,

[15] Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, *Booklet Keuangan Inklusif*, 14.
[16] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena frekuensinya yang terbatas dan pemanfaatan untuk menggunakan manfaat tersebut tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Hal ini terlihat dari para penerima manfaat program KUBerdaya yang hampir kesemuanya tidak mampu mengakses kembali jasa keuangan yang disediakan oleh LMI Kota Kediri. Ketidakmampuan mengakses kembali salah satunya disebabkan karena faktor keterbatasan SDM pengelola dan penerima bantuan, nominal yang diberikan masih kurang, atau nominal tidak cukup banyak, sehingga untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya masih merasa kesulitan. Fenomena ini sebagaimana yang dialami oleh Pak Mulyono yang meminjam Rp. 3.000.000 untuk berjualan martabak telor, tetapi hanya dicairkan Rp. 1.000.000.

**Ketiga**, indikator kualitas.[17] Melihat orientasi LMI untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat *duafa'*, dan menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki*, atribut dan produk yang dimiliki dengan memaksimalkan potensi ZISWAF masih belum bisa memenuhi kebutuhan para penerima manfaat. Pihak LMI masih sulit mengeluarkan bantuan modal usaha dengan nominal yang besar. Menurut Imam Sabudi, bagi individu dibatasi maksimal 2,5 juta, dan bagi kelompok maksimal 10 juta.[18] Produk yang ditawarkan juga masih sebatas pinjaman modal usaha atau bantuan alat kerja, baik dengan akad *hibbah* maupun akad *qard al-hasan*.

[17] Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, *Booklet Keuangan Inklusif*, 14
[18] Imam Sabudi, *Wawancara*, Kediri, 11 Juni 2108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Analisis Implikasi Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro di LMI Kota Kediri

Pada dasarnya, KUBerdaya sebagai wujud program keuangan inklusif ditujukan untuk menciptakan pemberdayaan terhadap masyarakat melalui pengembangan usaha mikro. Tujuan ini berupaya mengubah kondisi masyarakat *duafa'* (miskin dan lemah) untuk menjadi lebih berdaya, sejahtera dan bermartabat, sehingga akhirnya mampu merubah status seseorang dari *mustahik* (konsumen ZISWAF) menjadi *muzakki* (kontributor ZISWAF).

Keuangan inklusif yang dijalankan di LMI Kota Kediri melalui program KUBerdaya memiliki peran yang tidak kecil dalam rangka mewujudkan visi nasional keuangan inklusif untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tidak lain karena karakteristik LMI yang mampu menjangkau elemen masyarakat miskin dan marjinal yang *non bankable*, yang selama ini sulit dijangkau oleh beberapa lembaga keuangan.

Disamping itu, KUBerdaya ini mampu menjadi skema nyata dari intensitas jasa keuangan inklusif yang bertujuan untuk mengatasi situasi kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Tujuan yang dimaksud disini adalah sebagaimana yang ditulis oleh Nusron Wahid, yaitu:

1. Menjadikan keuangan inklusif sebagai satu usaha untuk membuka eksklusivitas lembaga keuangan yang pada umumnya hanya memberi permodalan kepada pihak-pihak yang dianggap *bankable*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menetapakan niat dalam menjalankan keuangan inklusif, yaitu niat kesediaan untuk memasukkan pihak non bankable yang selama ini dieksklusi atau dipinggirkan dari lembaga keuangan untuk dikategorikan kembali sebagai pihak yang layak dan patut mendapatkan berbagai jasa layanan keuangan.[19]

Program KUBerdaya dalam melakukan upaya sinergi antara keuangan shariah dan keuangan inklusif didalam program tersebut dengan memaksimalkan potensi ZISWAF, lalu menjadikannya sebagai instrumen keuangan inklusif telah dijalankan dengan cukup baik, meskipun belum mencapai ekspektasi yang diharapkan. Ekspektasi yang dimaksud adalah ekspektasi Jhordy yang hendak menjadikan ZISWAF sebagai dana awal bagi pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, kemudian akhirnya meningkatkan skala ekonomi mereka, selanjutnya mereka akan mampu menjangkau akses layanan keuangan dari lembaga keuangan shariah atau lembaga keuangan secara umum yang bersifat komersil.[20]

Ruslan Noor juga mendukung ekspektasi ini, ia mengatakan bahwa secara riil, ZISWAF dapat dialokasikan untuk mengatasi problem pembangunan ekonomi di Indonesia, yakni berupa hutang, pengangguran, dan kemiskinan. Hal ini disebabkan adanya potensi ZISWAF di Indonesia yang merupakan peluang bagi terwujudnya kesejahteraan sebagai wujud visi nasional keuangan inklusif.[21]

---

[19] Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Hegemoni Keuangan*, 64-65.
[20] Jhordy Kashoogie, "Kelola Zakat Untuk Umat", 15.
[21] Ruslan A. G. Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam: Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implikasi keuangan inklusif di LMI Kota Kediri menunjukkan pergerakan hasil yang positif. Hal ini berkaitan dengan penuturan para *mustahiq/ duafa'* yang menerima manfaat KUBerdaya ini, bahwa sebagian besar dari mereka telah merasakan manfaat dan perubahan kondisi perekonomian. Bagi yang sebelumnya sudah memiliki usaha, mereka merasakan ada peningkatan pendapatan, dan bagi yang memulai usaha baru, mereka merasakan ada peningkatan kemampuan ekonomi, meskipun tidak terlalu signifikan.

Jadi, sebagian besar *mustahiq/ duafa'* juga telah merasakan ada wujud keberdayaan sebagai hasil program bantuan yang telah diterima dari LMI Kota Kediri melalui KUBerdaya ini. Hal ini berdasarkan tinjauan indikator keberdayaan yang ditulis oleh Nur Mahmudi. Menurutnya, suatu masyarakat atau individu dikatakan berdaya apabila suatu masyarakat atau individu tersebut memiliki salah satu atau lebih dari empat variabel sebagai indikator keberdayaan.

Variabel yang dimaksud adalah sebagai berikut: **Pertama,** memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. **Kedua,** memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. **Ketiga,** memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. **Keempat,** memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri.[22]

[22] Ali Aziz et al., *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat* (Surabaya: Pustaka Pesantren, 2005), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 4.3**

**Indikator Keberdayaan *Mustahiq* (Penerima Bantuan) Program Ekonomi KUBerdaya di LMI Kota Kediri**

| NO. | Nama | Indikator 1 | Indikator 2 | Indikator 3 | Indikator 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Retno | Ya | Ya | Ya | Ya |
| **2** | Puji | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| 3 | Rio | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 4 | Mukhlis | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 5 | Siti Munawaroh | Ya | Tidak | Ya | Ya |
| 6 | Antok | Ya | Tidak | Ya | Ya |
| 7 | Ponidianto | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 8 | Ayub | Ya | Tidak | Ya | Ya |
| 9 | Mujianto | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 10 | Ina | Tidak | Ya | Tidak | Ya |
| 11 | Yatimah | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 12 | Edy Kurniawan | Tidak | Ya | Ya | Ya |
| 13 | Ika Agustina | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 14 | Mulyono | Tidak | Ya | Tidak | Ya |
| 15 | Minarti | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 16 | Umi Suryati | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| 17 | Puguh Widodo | Ya | Ya | Ya | Ya |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Hadi Widodo | Ya | Tidak | Ya | Ya |
| 19 | Sutrisno | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| 20 | Nanang Qosim | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 21 | Tatik Zunairiyah | Ya | Ya | Ya | Ya |

Dari paparan indikator keberdayaan diatas, program KUBerdaya dalam rangka menciptakan keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro di LMI Kota Kediri telah berimplikasi positif menciptakan pemberdayaan masyarakat meskipun belum secara signifikan. Implikasi yang positif ditunjukkan oleh kemampuan program KUBerdaya ini dalam menciptakan kondisi masyarakat atau individu yang lebih berdaya dari pada kondisi yang mereka alami sebelumnya.

Adapun terkait implikasi yang belum signifikan ini ditunjukkan melalui indikator keberdayaan yang belum tercapai secara keseluruhan dalam peningkatan kondisi masyarakat atau individu. Hal ini sebagaimana tersebut diatas disebabkan oleh beragam faktor terkait proses implementasinya, diantaranya adalah karena prinsip dan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang belum dijalankan secara baik, SDM yang kurang memadai dari dua belah pihak, serta lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih terbatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Keuangan inklusif di LMI Kota Kediri diimplementasikan melalui program KUBerdaya. Program ini mengupayakan kemudahan aksesibilitas keuangan bagi masyarakat *duafa'*/ *non-bankable* dengan memberikan pinjaman modal usaha atau bantuan alat kerja dengan menggunakan akad *qard al-hasan* atau akad *hibbah.*

   Implementasi KUBerdaya ini sudah cukup berhasil, tapi kinerja program yang dilakukan belum berjalan secara efisien. Hal ini diketahui dari indikator kinerja keuangan inklusif yang belum berjalan sesuai harapan. Indikator kinerja keuangan inklusif yang dimaksud adalah indikator ketersediaan akses, indikator penggunaan, dan indikator kualitas.

2. Implikasi keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro di LMI Kota Kediri menunjukkan pergerakan nilai yang positif. Sebagian besar *mustahiq/ duafa'* yang menerima bantuan, telah merasakan manfaat dan perubahan kondisi perekonomian. Bagi yang sebelumnya sudah memiliki usaha, mereka merasakan ada peningkatan pendapatan, dan bagi yang memulai usaha baru, mereka merasakan ada peningkatan kemampuan ekonomi, meskipun tidak terlalu signifikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, implikasi keuangan inklusif di LMI Kota Kediri telah mampu menciptakan pemberdayaan terhadap masyarakat meskipun belum secara signifikan. Hal ini berdasarkan tinjauan indikator keberdayaan yang ditulis oleh Nur Mahmudi. Menurutnya, suatu masyarakat atau individu dikatakan berdaya apabila suatu masyarakat atau individu tersebut memiliki salah satu atau lebih dari empat variabel sebagai indikator keberdayaan**,** yaitu mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil, mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mampu menghadapi ancaman dan serangan dari luar, dan mampu berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri.

**B. Saran**

1. LMI Kota Kediri perlu memberikan pelatihan secara khusus tentang ekonomi terkait pengelolaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serata meningkatkan upaya pendampingan secara intensif kepada para *mustahik/ duafa'*, sehingga mereka dapat meningkatkan skala ekonominya secara signifikan dan memiliki usaha yang berkelanjutan yang menciptakan kemandirian bagi mereka.
2. Perlunya meningkatkan kinerja porgram KUBerdaya di LMI Kota Kediri melalui upaya peningkatan SDM pengelola dan memperluas kerjasama dengan lembaga ekonomi atau sosial yang lain untuk memperkuat basis ekonomi atau sosial yang telah ada serta dapat menambah alokasi dana ZISWAF untuk keberlanjutan program KUBerdaya sehingga potensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ZISWAF bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui keuangan inklusif berbasis shariah.

3. Hendaknya pemerintah melalui lembaga keuangan formal atau lembaga swadaya yang kuat mendorong dan memotivasi atau membuat kebijakan untuk menciptakan upaya kerjasama riil dengan lembaga keuangan mikro shariah seperti LMI Kota Kediri agar dapat memamksimalkan potensi ZISWAF sehingga bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program keuangan inklusif berbasis shariah dengan mengembangakan usaha ekonomi mikro bagi para *duafa'*, khususnya kelompok *non-bankable*.

## C. Penutup

Akhirnya penelitian ini telah selesai. Peneliti berharap saran dan kritik agar bisa lebih baik. Semoga penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan kepada penulis secara khusus dan pembaca secara umum, baik aparatur pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan di Indonesia untuk lebih memperhatikan potensi ZISWAF, serta urgensi peran lembaga yang mengelolanya secara produktif dalam rangka menciptakan keuangan inklusif melalui bantuan modal usaha dengan akad qard al-hasan atau dengan akad hibah untuk memberdayakan masyarakat miskin dan duafa' melalui pengembangan usaha mikro, serta mewujudkan visi nasional keungan inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## BIBLIOGRAFI


‘Affār, Muhammad ‘Abdul Mun’im. *At-Takhtīṭ wa at-Tanmiyyah fī al-Islām.* Jeddah: Dār al-Bayān al-‘Arabī, 1985.

‘Auḍi, Rif’at as-Sayyid. *Minhāj al-Iddikhār wa al-Istimār fī al-Iqtiṣād al-Islāmī.* Kairo: Al-Ittihād ad-Dawlī al-Bunūk al-Islamiyah, tt.

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad S.. *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.

Ali Aziz, Moh. et al.. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: Pustaka Pesantren, 2005.

Antonio, Syafi’i. *Bank Shariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ardiana, Meta. “Kontrol Diri, Pendidikan Pengelolaan Keuangan Keluarga, Pengetahuan Inklusi Keuangan Siswa Pengaruhnya terhadap Perilaku Menabung Siswa SMK Se Kota Kediri”. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan,* Vol. 4. Dalam http://www.researchgate.net.

Arifin, Sirajul. “Ekonomi Lumbung dan Konstruksi Keberdayaan Petani Muslim Madiun”. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan,* Vol. 10, No. 1. Dalam http://inferensi.iainsalatiga.ac.id.

Asnaini, et al.. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Awang, Azam. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badudu, J.S. dan Sutan M. Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Beik, Irfan S. dan Laily D. A.. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM. *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.

Dunyā. *Tamwīl at-Tanmiyyah fī al-Iqtiṣōd al-Islāmī*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1984.

Eka, Hesi. "Kontribusi BPRS Merealisasi Financial Inclusion dalam Penguatan Ekonomi Lokal: Evaluasi Penguatan Strategi". *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, Vol.1, No.1. Dalam https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id.

Fitriastuti, Triana, et al.. "Implementasi Keuangan Inklusif bagi Masyarakat Perbatasan: Studi Kasus pada Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia". *SNEMA Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Dalam http://fe.unp.ac.id.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hafiddudin, Didin et al.. *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

_____. *Anda Bertanya Zakat, Infaq, Sedekah: Kami Menjawab*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Haris, Andi. "Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media", *Jupiter*, Vol. XIII, No. 2. Dalam http://journal.unhas.ac.id.

Hasan, Ali. *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan: Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Hendra, Tomi. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif al-Qur'an". Dalam http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id.

Hendrani, Nurzanah Esa. "Peran Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Kediri Cabang Kota Kediri dalam Memberdayakan Kaum Marginal di Kelurahan Semampir". Skripsi -STAIN, Kediri, 2013.

Hutomo, Mardi Y.. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoretik dan Implementasinya". Dalam http://www.bappenas.go id.

Irmawati, Setyani, Delu Damelia, dan Dita Wahyu Puspita. "Model Keuangan Inklusif pada UMKM Berbasis Pedesaan", *JEJAK: Journal of Economics and Policy*. Dalam http://journal.unnes.ac.id.

Karsidi, Ravik, "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro: Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah". *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 3 No. 2. Dalam http://repository.ipb.ac.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemdikbud RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Korten, David C.. *Pembangunan Yang Memihak Rakyat*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1984.

Malībāri (al), Zaynu ad-Dīn. *Fathu al-Mu'īn,* Juz 3. Surabaya: Pustaka al-Hidayah, tt.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.

Marlina, Lina dan Biki Zulfikri Rahmat. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya". *Jurnal Ecodemica,* Vol. 2, No. 1. Dalam http://ejournal.bsi.ac.id.

Miraza, Bachtiar Hassan. "Membangun Keuangan Inklusif", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 23, No. 2.

Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya, 2005.

Najiati, Sri et al.. *Pembedayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Weetlands International-Indonesia Programme, 2005.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: aBumi Aksara, 1997.

Nasution, Hairatunnisa et al.. "Analisis Keuangan Inklusif terhadap Pemberdayan Masyarakat Miskin di Medan".

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Noor, Ruslan A. G.. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam: Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Perwataatmaja, K. A. dan Hendri Tanjung. *Bank Shariah: Teori Praktik, dan Peranannya*. Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2007.

Raharjo, Mudjia. "Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya". Dalam http://repository.uin-malang.ac.id.

_____. "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif". Dalam http://www.uin-malang.ac.id.

Rakhmindyarto dan Syaifullah. "Keuangan Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan". Dalam http//: kemenkeu.go.id.

Rifa'i, Achmad. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM". *Human Falah*, Vol. 4 No. 2. Dalam http://jurnal.uinsu.ac.id.

Rukminto, Isbandi. *Pemikiran-pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002.

Sahal Mahfudz, Muhammad Ahmad. *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. 4. Yogyakarta: LkiS, 2004.

Salim, Meilisa et al.. "Analisis Implementasi Program Keuangan Inklusif di Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan: Studi pada Pedagang Golongan Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia". Dalam http://thesis-binus.ac.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saputro, Sumaryo G. dan Kordiyana K. Rangga. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Setyowati, Arin. "Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF oleh Civil Society dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Lazismu Surabaya". *Jurnal Maṣārif as-Sharī'ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Sharī'ah,* Vol. 2, No.1. Dalam http://journal.um-surabaya.ac.id.

Situmorang, Johnny W.. "Karakteristik Koperasi Sebagai Lembaga Finansial Inklusif". *INFOKOP*, Volume 24, No. 1. Dalam http://jurnal.smecda.com.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suharismi, Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

_____. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suharsono, Yudi. "Keuangan Syariah dan Keuangan Inklusif Bisa Bersinergi". Dalam http//:mysharing.co.

_____. "Peran Keuangan Syariah dalam Keuangan Inklusif". Dalam http://mysharing.co.

_____. "Perlunya Integrasi Instrumen Sosial dengan Keuangan Mikro". *Kuliah Umum Islamic Financial Services*. Dalam http://mysharing.co.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.0

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukandar, Zakia Finnafsi. “Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Dana Qard al-Hasan: Studi Kasus pada LMI Kota Kediri”. Skripsi - STAIN, Kediri, 2014.

Sumaryadi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV. Citra Utama, 2005.

Ulfiana, Diyah. “Peranan Pembiayaan *Qarḍ al-Hasan* dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Bidang Usaha Kecil dan Menengah: Studi Kasus di BMT ar-Rahman Tulungagung”. Skripsi - STAIN, Kediri, 2008.

Umar, Husain. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafondo Persada, 2005.

Wahid, Nusron. *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2014.

Zulkipli dan M. Asdar Andi N.. “Tujuan”. Dalam https://www.scribd.com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id